

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
MENGUNAKAN PENDEKATAN COSO  
STUDI KASUS KOPERASI WARGA PATRA V**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai  
Derajat Magister Manajemen



Oleh

**DYNA LUSI SUSANTI  
041224353021**

**Program Magister Manajemen  
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Airlangga  
2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : **Dyna Lusi Susanti**

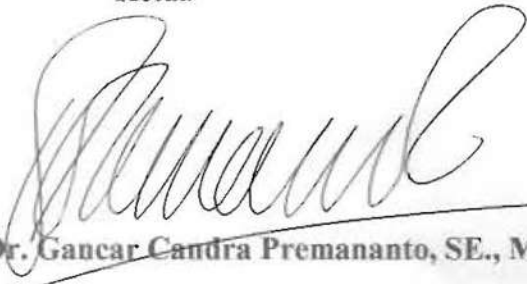
NIM : 041224353021

Telah melakukan perbaikan terhadap tesis yang berjudul “

**Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan Coso (Studi Kasus Koperasi Warga Patra V)** sebagaimana disarankan oleh tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2016

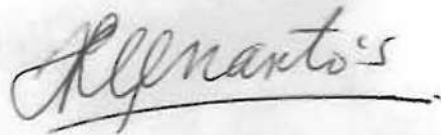
Tim Penguji

Ketua



**Dr. Gancar Candra Premananto, SE., MSi**

Panitera



**Prof. Ir. Riyanarto Sarno, SE., MSc., Ph.D.**

Anggota,



**Dr. rer.pol. Debby Ratna Daniel, Ak.**



**Dr. Indrianawati Usman, MS.**

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN COSO (STUDI KASUS KOPERASI WARGA PATRA V)

Diajukan oleh

DYNA LUSI SUSANTI  
041224353021

Telah disetujui oleh:

Pembimbing utama,



**Prof. Ir. Riyanarto Sarno, SE., MSc., Ph.D..**

Tanggal : 29-8-2016

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga



**Dr. Gancar Candra Premananto, SE., MSi.**  
NIP: 197407221999031001

Tanggal : 29-8-2016

## PERNYATAAN

Saya, (**Dyna Lusi Susanti, NIM 041224353021**) menyatakan

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan,



(Dyna Lusi Susanti)  
NIM 041224353021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1    PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1. Pengertian Koperasi.....	13
2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam .....	13
2.2.3. Siklus Simpan Pinjam.....	14
2.2.4. Special Audit (Audit Investigatif) .....	17
2.2.5. Definisi Pengendalian Internal.....	19
2.2.6. Tujuan Pengendalian Internal .....	20
2.2.7. Komponen Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.2.8. Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal.....	23
2.2.9. Keterbatasan Pengendalian Internal.....	24
BAB 3    METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Rancangan Penelitian.....	27
3.2.1. Pertanyaan Penelitian.....	27
3.2.2. Preposisi Penelitian.....	28
3.2.3. Unit Analisis.....	28
3.2.4. Logika yang Mengaitkan Data dengan Preposisi.....	28
3.2.5. Kriteria untuk Mengintepretasikan Temuan.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.5. Teknik Analisa Data.....	33

BAB 4	GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....	37
	4.1. Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Gatra V.....	37
	4.2. Tujuan Pendirian Koperasi.....	38
	4.3. Struktur Organisasi.....	38
	4.4. Kegiatan Bisnis Koperasi Gatra V.....	40
BAB 5	ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	45
	5.1. Profil Responden.....	45
	5.2. Kriteria Data yang Digunakan.....	46
	5.3. Hasil Analisis.....	47
	5.3.1. Wawancara Tahap Pertama.....	48
	5.3.2. Analisis Wawancara Tahap Pertama.....	50
	5.3.3. Wawancara Tahap Kedua.....	54
	5.3.4. Prioritas Perbaikan Sistem Pengendalian Internal.....	56
	5.3.5. Verifikasi Prioritas Perbaikan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Tahun 2014.....	57
	5.3.6. Area Perbaikan yang Dipetakan Dalam Prioritas.....	58
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN.....	66
	6.1. Simpulan.....	66
	6.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Proporsi Pembagian SHU Tahun 2014.....	4
Tabel 2.1. Komponen Pengendalian Internal.....	20
Tabel 2.2. Prinsip-prinsip Pengendalian COSO.....	23
Tabel 3.1. Logika Hubungan Data dan Preposisi.....	29
Table 3.2. Tahapan Teknis Penelitian.....	34
Tabel 5.1. Sampel Penelitian Kelompok 1.....	45
Tabel 5.2. Sampel Penelitian Kelompok 2.....	46
Tabel 5.3. Ringkasan Hasil Wawancara Tahap Pertama.....	49
Tabel 5.4. Rekapitulasi Defisiensi Pengendalian Internal.....	51
Tabel 5.5. Defisiensi Pengendalian Internal Setelah Verifikasi.....	55
Tabel 5.6. Prioritas Perbaikan Kelemahan Pengendalian Internal.....	56
Tabel 5.7. Pemetaan Prioritas, Area Perbaikan & Rekomendasi.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Koperasi Simpan Pinjam.....	14
Gambar 2.2. Keterkaitan Antar Komponen COSO.....	22
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Koperasi.....	39
Gambar 4.2. Pengajuan Pinjaman Koperasi.....	42
Gambar 4.3. Pengajuan Request Potongan.....	43
Gambar 4.4. Pelunasan Pinjaman Koperasi.....	43
Gambar 4.2. Perhitungan Dan Pencairan SHU.....	44
Gambar 5.1. Pemetaan Risiko Pengajuan Pinjaman Koperasi.....	61
Gambar 5.2. Pemetaan Risiko Pengajuan Request Potongan,.....	62
Gambar 5.3. Pemetaan Risiko Pelunasan Pinjaman Koperasi.....	62
Gambar 5.4. Pemetaan Risiko Perhitungan Dan Pencairan SHU.....	63



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.Perolehan SHU Koperasi Periode tahun 2011-2014.....	3
Grafik 1.2.Realisasi Penyaluran Pinjaman dan Aging Piutang Koperasi Tahun 2014.....	5

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Template Wawancara Tahap Pertama.
- Lampiran 2. Hasil Wawancara Tahap Pertama.
- Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Tahap Pertama
- Lampiran 4. Hasil Wawancara Tahap Kedua
- Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Wawancara Tahap Kedua
- Lampiran 6. Matriks Tindak Lanjut Temuan Audit Koperasi Tahun 2014

## DAFTAR ISTILAH

- AD : Anggaran Dasar
- AICPA : American Institute Certified of Public Accountans
- AMS : *Audit Monitoring System*
- ART : Anggaran Rumah Tangga
- COSO : *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission*
- ERM : *Entreprise Risk Management*
- IAI : Ikatan Akuntansi Indonesia
- KRP : Kendaraan Ringan Penumpang
- MOR : Marketing Operation Region
- RAT : Rapat Anggota Tahunan
- SHU : Sisa Hasil Usaha
- SKP : Surat Ketetapan Pinjaman
- SOX : Sarbanes-Oxley
- SPBU : Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum
- TI : Teknologi Informasi

## **Evaluation Of Internal Control System Using COSO Approach Case Study Koperasi Warga Patra V**

Dyna Lusi Susanti  
NIM : 041224353021

### **ABSTRAK**

In order to achieve organizational goals, continued preventive efforts need to be evaluated in order to prevent fraud and deficiencies in the company that could threaten its existing in the long term is a very important thing. Therefore, the implementation of the company's internal controls required under generally accepted guidelines publish by the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) Section 404. Referring to the guidelines, there is an international standard used in the form of a general framework for the company to draw up internal control systems ie COSO Framework.

This study was made as empirical evidence of the implementation of Sarbanes - Oxley (SOX) Act section 404 on the responsibility to create an adequate internal control structure and obligations of assessing the effectiveness of internal control structures and its capability to bring the organization into a better direction. The goal is to identify a weakness of internal control based on the COSO Framework and prioritize improvements. The research is qualitative descriptive case study at Koperasi Gatra V. Research datas are primary data by interviews and observations and secondary data such as documentation of research objects and documentation of independent parties. Analysis technique used is the reduction, verification and triangulation.

Based on the analysis we concluded that the internal control system in the Koperasi Gatra V is generally sufficient, especially for components of information and communication has been adequate, however, other components such as the control environment, risk assessment, control activities and monitoring still need improvement. The improvement priorities on weaknesses of internal control system are control activities and control environment components. Control activities improved by using an application or system automation in business processes. This Implementation will help Koperasi Gatra V in reducing risks related to fraud that has been identified in a special audit in 2014. Control environment enhanced by making a written code of ethics.

Keywords: internal control, COSO, Fraud, savings and loan cycle, special audit.

## **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan COSO Studi Kasus Koperasi Warga Patra V**

Dyna Lusi Susanti  
NIM : 041224353021

### **ABSTRAK**

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, upaya preventif yang terus dievaluasi untuk mencegah fraud dan defisiensi dalam perusahaan yang dapat mengancam kelangsungannya dalam jangka panjang adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu implementasi pengendalian internal perusahaan diwajibkan dalam pedoman yang berlaku umum yang dibuat oleh Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) Section 404. Mengacu pedoman tersebut, terdapat sebuah standar internasional berupa kerangka umum yang digunakan perusahaan untuk menyusun sistem pengendalian internal yaitu COSO Framework.

Penelitian ini dibuat sebagai bukti empiris penerapan Sarbanes - Oxley ( SOX ) Act section 404 mengenai tanggung jawab untuk membuat struktur pengendalian internal yang memadai dan kewajiban menilai efektivitas struktur pengendalian internal mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya kelemahan pengendalian internal berdasarkan COSO Framework dan membuat prioritas perbaikan. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada Koperasi Karyawan Gatra V. Data penelitian berupa data primer hasil wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumentasi obyek penelitian dan dokumentasi dari pihak independen. Teknik analisa yang digunakan adalah reduksi, verifikasi dan triangulasi.

Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal di Koperasi Gatra V secara umum cukup memadai terutama untuk komponen informasi dan komunikasi telah memadai, namun demikian komponen lain seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan monitoring masih perlu penyempurnaan. Adapun prioritas perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal tersebut adalah komponen aktivitas pengendalian dan komponen lingkungan pengendalian. Komponen aktivitas pengendalian ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi atau sistem otomasi dalam proses bisnisnya. Penerapan aplikasi atau otomasi proses bisnis akan membantu Koperasi Gatra V dalam mereduksi risiko-risiko terkait fraud yang telah teridentifikasi dalam spesial audit tahun 2014. Komponen lingkungan pengendalian ditingkatkan dengan membuat kode etik secara tertulis.

Kata kunci : Pengendalian Internal, COSO, Fraud, Siklus simpan pinjam, spesial audit.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, implementasi pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini berlaku secara general untuk seluruh organisasi, baik yang berskala kecil maupun besar, perusahaan berorientasi laba maupun perusahaan nirlaba. Sejarah mencatat, kebutuhan akan pengendalian internal dirasa sangat perlu ketika manusia belajar dari peristiwa jatuhnya perusahaan-perusahaan besar yang bersumber dari *Fraud*. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pelajaran berharga yang memberikan kesadaran bahwa pengendalian internal adalah upaya preventif yang harus terus dievaluasi untuk mencegah defisiensi dalam perusahaan yang dapat mengancam kelangsungannya dalam jangka panjang. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan sebuah pedoman untuk implementasi pengendalian internal yaitu Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) dimana didalamnya mengatur kewajiban adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan (SOX *section* 404).

Mengacu pengendalian internal yang diwajibkan dalam SOX, ada sebuah standar berupa kerangka umum yang digunakan perusahaan untuk menyusun sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kebutuhannya, kerangka kerja ini adalah COSO Framework yang diterbitkan tahun 1992 oleh organisasi independen yang bernama *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission* (COSO). Sesuai dengan ketentuan dalam Sarbanes -

Oxley (SOX) Act section 404 yang menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk struktur pengendalian internal yang memadai, dan penilaian oleh manajemen terhadap efektivitas struktur pengendalian, serta melaporkan segala kekurangan dalam kontrol. Dengan menggunakan pendekatan COSO, dalam kajian ini akan diberikan bukti langsung mengenai kasus kelemahan pengendalian internal dan menilai langkah perbaikan yang telah ditempuh dalam rangka menilai efektivitas pengendalian internal yang telah dibangun tersebut. Adapun kasus yang digunakan adalah kasus Koperasi Warga Patra V (Gatra V) tahun 2014.

Koperasi Gatra V adalah salah satu entitas bisnis yang berorientasi laba yang merasa perlu menerapkan pengendalian internal secara menyeluruh setelah diterpa kerugian financial dalam jumlah yang signifikan akibat kelemahan pengendalian internal yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun bukan organisasi publik, Koperasi Gatra V memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kinerjanya yang telah diaudit kepada anggota setiap tahun dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengalaman pahit yang dialami Koperasi Gatra V membuat pengurus koperasi sadar bahwa untuk menjamin kinerja koperasi yang bersih dan terpercaya, Koperasi Gatra V perlu mengacu kepada standar yang berlaku umum yaitu Sarbanes - Oxley (SOX ) Act *section* 404.

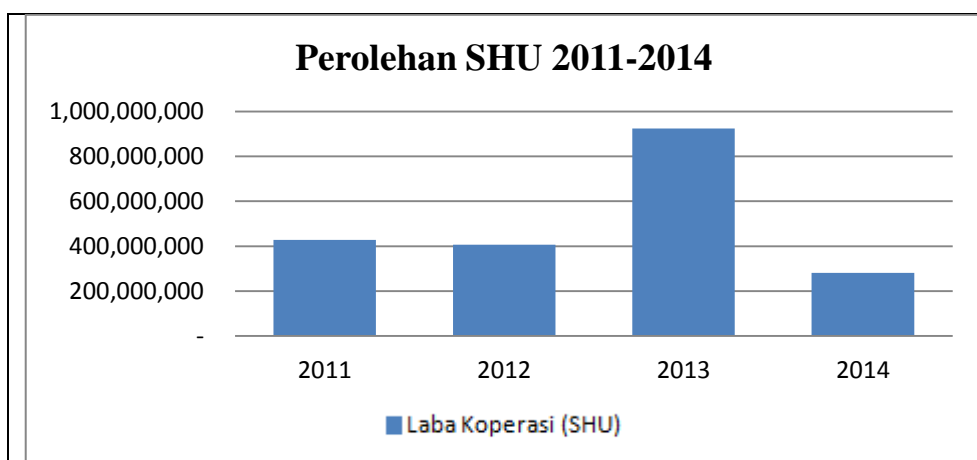
Pada tahun 2014 anggota koperasi menuntut adanya RAT dikarenakan pengurus koperasi periode tersebut tidak menyelenggarakan RAT dan tidak membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 3 tahun. Seharusnya RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Gatra V, dan SHU sebagai hasil dari bisnis koperasi dibagikan setiap tahun atau dihitung terutang apabila digunakan untuk mendanai pengembangan usaha. RAT telah dilaksanakan pada Bulan Mei 2014 di Kantor Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan koperasi dengan tujuan apakah dana yang terkumpul dari anggota telah dikelola sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi. Berdasarkan laporan hasil audit diperoleh beberapa isu yang merupakan *red flag* adanya kelemahan pengendalian internal (*internal control*) yang serius telah terjadi di dalam organisasi Koperasi Gatra V, diantaranya dalam :

#### 1. Pembagian SHU

Pada penghujung tahun 2014, dengan aktivitas bisnis yang relatif sama, SHU yang dibukukan turun secara signifikan dari Rp.924.307.651,- di akhir tahun 2013 menjadi Rp.281.262.022,- (Grafik 1.1). Tidak ada penjelasan yang memadai atas penurunan laba koperasi tersebut.

**Grafik 1.1 Perolehan SHU Koperasi Periode tahun 2011-2014**



Sumber Data : Laporan Hasil Audit Tahun 2014



**Tabel 1.1. Proporsi Pembagian SHU Tahun 2014**

<b>PROPORSI PEMBAGIAN SHU TAHUN 2014 DALAM RUPIAH</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Pengurus</b>	<b>Manajemen</b>	<b>Anggota</b>
Alokasi SHU (Rupiah)	251.993.145	125.996.573	81.976.007
Jumlah Orang	7 Orang	7 Orang	599 Orang
Rata-rata SHU per orang (Rupiah)	35.999.021	17.999.510	1.472.414

*Sumber Data : Laporan Hasil Audit Tahun 2014*

Sejak tahun 2011 Koperasi Gatra V mengakui adanya SHU dalam laporan keuangannya namun tidak pernah membagikan kepada anggota. Untuk pertama kalinya sejak tahun itu, Koperasi Gatra V membagikan SHU kepada anggota yang jumlah totalnya merupakan akumulasi SHU periode 2011 sampai 2014. Dalam perhitungan SHU dibagikan, secara perorangan pegawai koperasi yang notabene bukan anggota menerima jumlah SHU lebih besar daripada anggota dan pengurus koperasi. Dalam Anggaran Dasar jelas dinyatakan bahwa Manajemen Koperasi tidak termasuk para pihak yang berhak menerima SHU. Proporsi pembagian SHU Tahun 2014 dalam Tabel 1.1 menjelaskan bahwa rata-rata satu orang manajemen koperasi menerima SHU sebesar Rp.17.999.510,- dan rata-rata SHU yang diterima anggota koperasi hanya Rp.1.472.414,-.

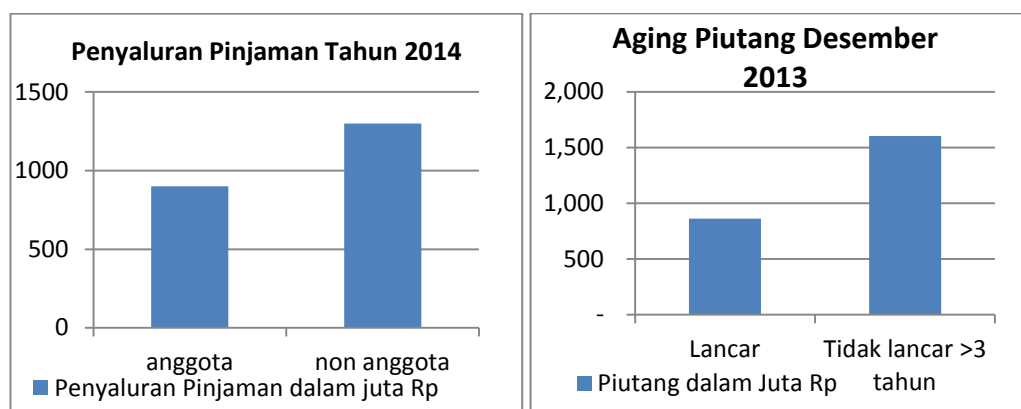
## 2. Siklus Piutang (Simpan Pinjam)

Penyajian piutang dalam laporan keuangan Koperasi Gatra V *overstated*, karena diakui beserta bunga yang belum berjalan. Pada aktivitas pemberian pinjaman, Tahun 2014 koperasi menyalurkan pinjaman lebih banyak kepada

non anggota koperasi. Ilustrasi Grafik 1.2 menunjukkan realisasi penyaluran pinjaman koperasi tahun tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,- kepada non anggota dan kepada anggota hanya sebesar Rp.900.000.000,-. Hal ini tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi yang menyatakan bahwa pinjaman hanya kepada anggota koperasi saja.

Selain temuan tersebut, audit juga mengungkapkan fakta bahwa mayoritas pemberian pinjaman kepada anggota tidak melalui otorisasi pengurus koperasi dan terdapat penyaluran dana kepada anggota tanpa Surat Ketetapan Pinjaman (SKP) sebesar Rp.895.000.000,-.

**Grafik 1.2 Realisasi Penyaluran Pinjaman dan Aging Piutang Tahun 2014**



*Sumber Data : Laporan Hasil Audit Tahun 2014*

Kelamahan pengendalian internal lain terlihat dalam aktivitas penagihan piutang. Kebijakan pemberian pinjaman yang ditetapkan dalam usaha simpan pinjam Koperasi Gatra V maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Berdasarkan data Laporan keuangan per 31 Desember 2013 dari total piutang kepada anggota maupun non anggota sebesar Rp.2.466.706.958,-, sejumlah 65% piutang

senilai Rp.1.603.359.523,- tidak lancar yang mayoritas berumur diatas 3 tahun. Piutang lancar hanya sebesar 35% dari total piutang senilai Rp.561.175.833,-, perbandingan proporsi piutang tidak lancar terhadap piutang lancar dapat dilihat pada Grafik 1.2.. Fakta lain yang ditemukan pada saat audit adalah adanya pernyataan tertulis dari seorang pekerja koperasi, bahwa beberapa setoran anggota untuk membayar cicilan pinjaman secara tunai tidak disetor ke dalam rekening koperasi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pekerja Koperasi tersebut.

Dengan kelemahan pengendalian internal tersebut tim audit merekomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk mengembalikan fungsi pengendalian internal agar dapat mendukung tujuan Koperasi, diantara adalah :

1. Mengganti seluruh manajemen koperasi, mulai dari manajer hingga jajaran pekerja dibawahnya. Hal ini ditujukan untuk memperbaiki lingkungan pengendalian karena komposisi manajemen koperasi sebelumnya dinilai telah terjadi kolusi yang mengakibatkan implementasi perbaikan pengendalian internal akan menjadi sia-sia.
2. Perbaiki siklus pencatatan dan pelaporan SHU serta siklus simpan pinjam.

Di dalam aksi lanjut rekomendasi ini, audit mensyaratkan :

- a. Adanya otorisasi berjenjang sebagai kontrol aktivitas simpan pinjam serta pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara fungsi eksekutor, pencatatan, dan pemberi persetujuan.

- b. Transaksi pembagian SHU, penyaluran dan pembayaran cicilan pinjaman wajib menggunakan sistem transfer bank. Transaksi tunai hanya digunakan untuk pembayaran atau pembelanjaan yang memang tidak dapat dilakukan dengan metode transfer, seperti pembayaran SHU kepada anggota yang telah lama pensiun.

Aksi lanjut rekomendasi audit tersebut telah dijalankan selama satu tahun secara bertahap mulai bulan April 2014 hingga saat ini. Aksi lanjut ini adalah upaya pengurus dalam memenuhi ketentuan Sarbanes - Oxley ( SOX ) Act *section* 404 mengenai tanggung jawab untuk membuat struktur pengendalian internal yang memadai. Setelah satu tahun implementasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Sarbanes - Oxley ( SOX ) Act *section* 404 mengenai kewajiban menilai efektivitas struktur pengendalian internal, pengurus koperasi merasa perlu untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian internal pasca diterapkannya rekomendasi audit untuk mengetahui bahwa praktek yang dijalankan masih dalam koridornya dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kajian penelitian menggunakan pendekatan COSO yang konsisten dengan pendekatan yang direkomendasikan oleh audit sebelumnya, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan internal secara berkesinambungan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Koperasi Gatra V berdasarkan 17 prinsip pengendalian COSO?
2. Komponen-komponen apakah yang belum memadai dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V?
3. Apa yang menjadi prioritas dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V yang perlu diperbaiki atau dikembangkan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi apakah terdapat kelemahan pengendalian internal dalam proses bisnis koperasi, terutama dalam siklus simpan pinjam dan pembagian SHU.
2. Mengidentifikasi komponen COSO yang belum memadai dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V.
3. Mengidentifikasi prioritas perbaikan dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi maupun kajian dalam penelitian sejenis, terutama dalam memberikan bukti empiris penerapan Sarbanes - Oxley ( SOX ) Act *section* 404 mengenai tanggung jawab untuk membuat struktur pengendalian internal yang memadai dan kewajiban menilai efektivitas struktur pengendalian internal mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

##### 2. Manfaat praktis

- Memberikan gambaran sejauh mana tingkat keberhasilan pengurus koperasi dan manajemen koperasi dalam usaha membangun pengendalian internal yang memadai.
- Sebagai salah satu usaha perbaikan sistem pengendalian internal yang berkelanjutan, rekomendasi atas sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V diharapkan dapat diberikan dan digunakan sebagai bahan dalam Rapat Anggota Tahunan pada pertanggungjawaban kepengurusan tahun 2014-2017.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian utama yang menjadi dasar penelitian-penelitian lanjutan dalam hal evaluasi internal kontrol adalah penelitian yang disponsori dan dipublikasi oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO)* yaitu penelitian *Fraudulent Financial Reporting, An Analysis of U.S. Public Company* yang mengambil sampel kurun waktu 10 tahunan. Penelitian pertama dilakukan tahun 1999 dengan sampel kasus *Fraudulent Financial Reporting* perusahaan publik Amerika yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1987 – 1997, penelitian dilakukan oleh Mark S. Beasley dkk. Penelitian kedua pada tahun 2010 dengan sampel kasus *Fraudulent Financial Reporting* yang terjadi dalam periode tahun 1998 – 2007 dilakukan oleh tim yang sama. Kedua penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan acuan pemikiran melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman untuk *Entreprise Risk Management (ERM), internal control* dan pengendalian *fraud* dalam perusahaan.

Setelah kedua penelitian diatas, berkembang penelitian lanjutan yang terkait dengan *COSO Frameworks* yang lebih spesifik dalam kaitannya dengan *ERM, internal control, dan fraud*. Penelitian terkait *ERM* antara lain studi mengenai faktor bias dalam mengelola *ERM* (Baumann, 2012) ; dan studi aplikatif pada perusahaan tertentu seperti Analisa Implementasi *ERM* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sari, 2010). Penelitian yang mengambil spesifikasi *fraud* umumnya

menganalisa *fraud triangle* dan faktor yang mempengaruhi *fraud* (Rosita, 2014), Peranan internal audit dalam meminimalisasi *fraud* (Legawa, 2015) dan deteksi indikasi *fraud* (Putra, 2015). Sementara studi yang berfokus pada sisi internal kontrol umumnya mengevaluasi efektifitas internal kontrol dalam sebuah entitas dan memberikan rekomendasi untuk aplikasi perbaikan.

Danescu dan Dogar (2012) melakukan penelitian pada European Social Fund (ESF) di Romania dengan pertanyaan apakah ESF telah memenuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku umum. Hipotesa tersebut diukur dengan melaksanakan sebuah studi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan prinsip pengendalian COSO atas implementasi ESF. Analisa dilakukan dengan mengukur efektivitas dalam bentuk prosentase. Hasilnya ESF telah memenuhi prinsip manajemen keuangan berdasarkan data peningkatan pada manajemen nasional dan sistem pengendalian yang selaras dengan pengendalian internal pada penerima manfaat.

Kobat (2014) melakukan penelitian yang sama atas siklus yang berbeda, yaitu efektivitas pengendalian internal terhadap penyalahgunaan aset di PT South Pacific Viscose. Studi ini menggunakan *internal control questionnaire* dan analisa champion, Kobat menyimpulkan sistem pengendalian internal yang pada obyek yang diteliti telah efektif kecuali untuk komponen *monitoring*.

Sinaga (2014) melakukan penelitian dengan tentang efektivitas pengendalian internal siklus penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan COSO framework. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus PT Imanuel Agape tahun 2014. Evaluasi menggunakan analisa Champion, yaitu mengukur prosentase jawaban



positif terhadap total pertanyaan untuk menggambarkan tingkat efektivitas komponen pengendalian. Hasilnya kelima komponen COSO telah ada dan berfungsi, namun perlu ditingkatkan terutama komponen lingkungan pengendalian.

Sirait (2015) melakukan penelitian efektivitas pengendalian internal pada siklus penggajian dan kepegawaian untuk menentukan risiko fraud dengan studi kasus Wisma MM UGM Tahun 2015. Dengan menggunakan indikator penilaian 17 prinsip pengendalian COSO dan teknik analisa koefisien asosiasi Champion, penelitian ini menyimpulkan pengendalian internal dalam siklus penggajian dan kepegawaian telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko fraud.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan berupa studi kasus kualitatif deskriptif dan juga mengukur tingkat efektivitas dengan menggunakan prinsip COSO, bedanya dalam penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan efektif dengan satu kumpulan responden. Peneliti melakukan validasi hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada kelompok responden yang berbeda yang relevan, membuat prioritas dan membandingkan dengan pendapat pihak independen serta menganalisa risiko-risiko dalam proses bisnis yang dapat diminimalkan dengan penerapan COSO.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

Koperasi Gatra V adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, sehingga aktivitas simpan pinjam merupakan *core business* Koperasi Gatra V.

### **2.2.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Undang Undang No 25 Tahun 1992, yang diperbarui dalam Undang Undang No 17 Tahun 2012 :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Secara ringkas definisi koperasi disimpulkan sebagai sebuah badan usaha, yang berisi sekumpulan orang atau badan hukum yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

### **2.2.2 Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut Abdurahman dan Abdurrahman (2014) koperasi simpan pinjam adalah :

“koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah”.

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK (2007) adalah sebagai berikut:

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya”.

Memperhatikan uraian diatas dapat disarikan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dan menarik keuntungan berupa bunga yang pada akhirnya akan diakumulasikan dan dikembalikan kepada anggotanya dalam bentuk SHU.

### **2.2.3 Siklus Simpan Pinjam**

Sistem Informasi Akuntansi memiliki beberapa sub sistem yang berupa siklus-siklus akuntansi. Koperasi simpan pinjam memiliki Sistem Informasi Akuntansi yang sama dengan perusahaan lain pada umumnya. Dalam sebuah usaha simpan pinjam terdapat dua siklus utama yaitu, *funding* adalah kegiatan mengumpulkan dana dari anggota yang kelebihan dana (dalam bentuk simpanan) dan *lending* yaitu menyalurkan dana bagi anggota yang membutuhkan dana (dalam bentuk pinjaman/kredit). Dalam siklus *lending* koperasi memungut bunga dari anggota sebagai keuntungan, yang pada akhirnya akumulasi bunga akan dikembalikan sebagai insentif kepada anggota yang telah melakukan *funding* dan *lending*.

Menurut Soemarso (2009), siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan dan kegiatan pelaporan dan pencatatan mulai dari terjadinya transaksi hingga laporan keuangan. Suharli (2008) menjelaskan siklus akuntansi adalah rangkaian proses yang berurutan mulai dari terjadinya transaksi, analisa sampai pelaporannya.

Baik Soemarso maupun Suharli menekankan bahwa siklus akuntansi adalah proses yang berurutan dari kejadian transaksi hingga pelaporan. Oleh karena itu memperhatikan kedua definisi tersebut maka siklus simpan pinjam dapat

dijabarkan sebagai rangkaian proses yang berurutan mulai dari terjadinya aktivitas *fungding* dan *lending* hingga dibuat laporan keuangan.

**Gambar 2.1. Siklus Koperasi Simpan Pinjam**



\*Sumber : Sistem Akuntansi, Mulyadi, 2010.

Mulyadi (2010) menjelaskan bahwa dalam setiap rancangan siklus akuntansi ada tiga hal penting yang didefinisikan dengan jelas yaitu fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, dan catatan yang dibuat. Gambaran siklus simpan pinjam dapat dilihat pada Gambar 2.1, dimana terdapat minimal fungsi yang dibuat yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang terpisah sehingga memungkinkan adanya pengawasan melekat atau disebut juga *Segregation of Duty*. Secara teoritis Fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi layanan (*customer service*), bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan melayani pelanggan dalam mengajukan pinjaman, simpanan, pelunasan dan penarikan dana.
2. Fungsi Kas bertugas memcairkan pinjaman dan penarikan maupun menerima pembayaran pelunasan dan simpanan sesuai aplikasi yang telah diverifikasi dan disetujui.

3. Fungsi akuntansi bertanggung jawab mencatat transaksi pengeluaran dan pembayaran pinjaman serta membuat laporan keuangan.

Dokumen terkait kegiatan simpan pinjam adalah :

1. Aplikasi pengajuan pinjaman atau pelunasan, dibuat oleh fungsi layanan sebagai bukti mengenai seluruh transaksi simpan pinjam yang diperlukan manajemen.
2. Bukti bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti adanya pengeluaran dan pemasukan kas dari kegiatan simpan pinjam.
3. Rekap saldo pinjaman/simpanan (jika ada), dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai bahan fungsi layanan dalam memberikan informasi pinjaman maupun pelunasan.

Adapun catatan yang digunakan dalam system akuntansi simpan pinjam adalah :

1. Jurnal piutang, catatan akuntansi harian untuk mendokumentasikan transaksi simpan pinjam.
2. Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat saldo piutang selama periode tertentu.
3. Kartu Piutang, digunakan untuk mencatat detail piutang dan pelunasan per pelanggan.
4. Kartu Simpanan, digunakan untuk mencatat detail simpanan dan penarikan per pelanggan.

Dengan demikian alur simpan pinjam dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Layanan menerima aplikasi pengajuan pinjaman, simpanan, pelunasan dan penarikan dana dari pelanggan. Kemudian melakukan evaluasi kecukupan

persyaratan berdasarkan data rekap saldo pinjaman. Aplikasi yang memenuhi syarat dan disetujui dikirimkan kepada Fungsi Kas.

2. Fungsi Kas melakukan pencairan maupun setoran pada bank berdasarkan aplikasi yang dikirim dari Fungsi Layanan, kemudian membuat bukti bank sebagai bukti bahwa transfer dana telah dieksekusi. Bukti aplikasi dan bukti bank diteruskan ke fungsi akuntansi.
3. Fungsi Akuntansi mencatat jurnal harian berdasarkan bukti aplikasi dan bukti bank yang diterima dan memperbarui catatan dalam kartu piutang dan kartu simpanan. Catatan tersebut diolah ke dalam jurnal umum yang akan menjadi bahan dalam membuat laporan keuangan.

#### **2.2.4 Special Audit (Audit Investigatif)**

Sesuai permasalahan yang mendasari yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada tahun 2014 anggota menuntut audit pada Koperasi Gatra V.

Pengertian audit sendiri menurut Arens et al (2010) adalah :

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria.”*

Definisi audit yang lain adalah menurut Whittington et al (2012) adalah :

*“Auditing is an examination of a company’s financial statement by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statement provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited.”*

Kedua definisi tersebut menyatakan bahwa audit adalah kegiatan evaluasi atas suatu informasi atau laporan, namun Arens (2010) lebih mengedepankan sisi ketaatan pada kriteria atau *compliance*, sementara Whittington (2012) fokus untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan kembali bahwa audit adalah kegiatan evaluasi dan pengujian yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dengan tujuan untuk memberikan tingkat keyakinan tertentu (tidak mutlak) bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan cukup untuk memenuhi kriteria atau standar penyajian laporan keuangan yang berlaku secara umum.

Ditinjau dari cakupannya, menurut Agoes (2012) audit dibedakan menjadi dua yaitu :

1. *General Audit* (Audit Umum)

Adalah audit secara umum terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak independen dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. *Special Audit* (Audit Khusus)

Adalah suatu audit yang dilakukan oleh pihak yang independen yang cakupannya terbatas sesuai permintaan pihak yang berkepentingan (direksi, manajemen, maupun auditee ) dengan tujuan memberikan pendapat pada masalah tertentu terbatas pada area yang diaudit.

Memperhatikan penggolongan audit diatas, maka audit yang diminta oleh anggota tahun 2014 termasuk dalam *special audit*, yaitu untuk tujuan tertentu melakukan pemeriksaan atas siklus simpan pinjam hingga pembagian SHU untuk

membuktikan dugaan adanya *fraud* dalam pengelolaan aktivitas tersebut. Audit jenis ini biasanya juga disebut sebagai audit investigatif.

### **2.2.5 Definisi Pengendalian Internal**

Hasil audit investigatif tahun 2014 menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal dalam siklus simpan pinjam Koperasi Gatra V. Adapun pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut :

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah :

*“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”*

Dengan kata lain pengendalian internal adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dalam perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengertian pengendalian internal menurut COSO senada dengan definisi yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan American Institute Certified of Public Accountans (AICPA), yaitu sama menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas kehandalan laporan keuangan, operasional yang efisien dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Hanya saja AICPA menambahkan tujuannya dengan pengamanan aset.



### 2.2.6 Tujuan Pengendalian Internal

Memperhatikan tujuan pengendalian pengendalian internal yang ada dalam definisi pengertian pengendalian internal di awal dan perbandingannya dengan definisi dari berbagai pihak, maka dapat kita rangkumkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah :

1. Keandalan laporan keuangan
2. Meningkatkan efektivitas operasi
3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku
4. Pengamanan aset.

### 2.2.7 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Dalam suatu sistem pengendalian internal yang efektif menurut COSO (2013), harus memenuhi lima komponen utama yang saling berkaitan, Lima komponen pengendalian internal tersebut adalah :

**Tabel 2.1. Komponen Pengendalian Internal**

<p><b>Lingkungan Pengendalian</b> (<i>Control Environment</i>)</p>	<p>Adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal di seluruh organisasi. Direksi dan manajemen menetapkan kebijakan yang jelas terkait pentingnya pengendalian internal dan perilaku standar yang diharapkan.</p> <p>Lingkungan pengendalian adalah cermin sikap dan tindakan pemilik &amp; manajemen, sehingga menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya.</p> <p>Atmosfer yang tercipta dari lingkungan pengendalian sangat mempengaruhi efektivitas komponen pengendalian internal secara keseluruhan.</p>
--	---

<p><b>Penilaian Risiko (Risk Assessment)</b></p>	<p>Adalah proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam mencapai tujuan entitas serta menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam konteks ini, tidak terbatas risiko laporan keuangan yang tidak handal, melainkan juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal.</p>
<p><b>Aktivitas Pengendalian (Control Activities)</b></p>	<p>adalah tindakan yang diatur oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan organisasi untuk mengurangi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dilakukan di semua tingkat dan di berbagai tahap dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan. Contoh aktivitas pengendalian adalah otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, revidu, pemisahan tugas dan tanggung jawab.</p>
<p><b>Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)</b></p>	<p>Informasi diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Komunikasi adalah kegiatan terus-menerus dan proses berulang untuk menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian internal, dan untuk menilai efektivitas. Dengan kata lain informasi dan komunikasi ini adalah bentuk dari identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu tertentu sedemikian hingga membuat orang-orang dalam organisasi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik secara internal (ke seluruh level organisasi) maupun eksternal (kepada pihak yang berkepentingan).</p>

<b>Pemantauan (Monitoring)</b>	adalah kegiatan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Setiap ditemukan adanya kekurangan harus dievaluasi dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada direksi.
------------------------------------	--

*\*Sumber : The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013.*

Kelima komponen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dilaksanakan di seluruh aktivitas dan level dalam organisasi, mulai dari yang terkecil hingga tingkat entitas. Hubungan 5 komponen pengendalian COSO dengan aktivitas organisasi dan level dalam organisasi diilustrasikan dalam Gambar 2.2

**Gambar 2.2. Keterkaitan Antar Komponen COSO**



*\*Sumber : The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013.*

Dalam *Framework 2013*, COSO memperjelas kelima komponen tersebut dalam 17 prinsip yang menjadi syarat terbentuknya pengendalian internal yang

efektif dalam sebuah perusahaan, dimana dalam *framework* sebelumnya prinsip-prinsip tersebut hanya dijelaskan secara implisit. Tujuh belas prinsip tersebut dijabarkan dalam Tabel 2.2

**Tabel 2.2. Prinsip-prinsip Pengendalian COSO**

<b>Komponen</b>	<b>Prinsip</b>	
Lingkungan Pengendalian	1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis
	2	Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan tugas
	3	Membuat struktur, garis pelaporan, otorisasi dan pertanggungjawaban
	4	Komitmen pada kompetensi
	5	Mengembangkan akuntabilitas
Penilaian Risiko	6	Menetapkan tujuan dengan jelas
	7	Identifikasi dan analisa risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan
	8	Menilai potensi risiko fraud
	9	Mengidentifikasi dan menganalisa perubahan yang signifikan
Aktivitas Pengendalian	10	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian
	11	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi
	12	Menerapkan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur
Informasi dan Komunikasi	13	Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan
	14	Mengkomunikasikan secara internal
	15	Mengkomunikasikan secara eksternal
Pemantauan	16	Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan
	17	Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan defisiensi

\*Sumber : *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013.*

### 2.2.8 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal

Sesuai dengan definisi pengendalian internal dalam COSO 2013, di dalam sebuah organisasi, setiap orang menjadi bagian dan memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian internal. Pihak eksternal seperti auditor independen dan badan pengatur (*regulatory body*) dapat membantu organisasi untuk menerapkan

pengendalian intern dengan cara memberikan informasi dan melakukan evaluasi yang bermanfaat. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah sebagai berikut :

1. Manajemen
2. Dewan komisaris dan komite audit
3. Auditor internal
4. Seluruh karyawan
5. Auditor independen
6. Pihak eksternal lain

### **2.2.9 Keterbatasan Pengendalian Internal**

Ada banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, sebarang baikny sistem pengendalian internal, selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian yang dibangun tidak berjalan sesuai harapan akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. COSO (2013) mengemukakan beberapa batasan pengendalian internal sebagai berikut :

*“The Frameworks recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgement or decisions, or external events that can cause organization to fail to achieve its operational goal.”*

Dengan kata lain COSO membatasi bahwa pengendalian internal tidak dapat melindungi perusahaan dari keputusan yang buruk dan perubahan lingkungan eksternal. Sementara Mulyadi (2002) menguraikan batasan pengendalian internal

meliputi kesalahan pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, serta biaya berbanding manfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak ditujukan untuk menghilangkan semua risiko yang tidak diharapkan. Sistem pengendalian tidak dapat melindungi perusahaan dari masalah yang timbul akibat faktor kesalahan manusia dan perubahan lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan perusahaan. Dengan berbagai keterbatasannya serta mempertimbangkan biaya dan manfaat, pengendalian internal hanya mampu memberikan keyakinan sampai tingkat tertentu, bahwa semua resiko tersebut telah dikurangi sampai ke level minimal yang dapat ditoleransi oleh perusahaan.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal yang menggunakan 17 prinsip dan 5 komponen pengendalian COSO sebagai alat analisa. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan Maleong (2014).
2. Pendekatan deskriptif dipilih terkait dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan fenomena pada obyek yang sedang diteliti Yin (2013), dalam hal ini berupa pencapaian yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi secara obyektif. Statistik deskriptif juga digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya Sugiyono (2012).
3. Studi kasus digunakan mengingat obyek yang diteliti hanya satu, yaitu Koperasi Gatra V. Studi kasus juga mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa spesifik yang terjadi dalam perusahaan sehingga fokus pada satu permasalahan dalam hal ini penerapan pengendalian internal yang memungkinkan peneliti untuk lebih memahami runtutan peristiwa yang sedang terjadi.

4. Pendekatan COSO dipilih karena konsisten dengan pendekatan yang digunakan oleh audit pada tahun 2014. Selain itu pendekatan ini menyediakan *framework* standar yang telah teruji dan berlaku secara internasional.

### **3.2. Rancangan Penelitian**

Ada lima komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah penelitian kualitatif Yin (2013), yaitu pertanyaan penelitian, proposisi penelitian (jika ada), unit analisis, logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan.

#### **3.2.1. Pertanyaan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah pada Bab I, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Koperasi Gatra V berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian COSO?
2. Komponen-komponen apakah yang belum memadai dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V?
3. Apa yang menjadi prioritas dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V yang perlu diperbaiki atau dikembangkan?



### **3.2.2. Proposisi Penelitian**

Dalam rangka memberikan batasan dan arahan dalam melaksanakan penelitian, baik dalam kegiatan mengumpulkan data dan informasi maupun pada saat memberikan kesimpulan, maka proposisi penelitian dibuat untuk menjamin agar informasi dan data yang diperoleh serelevan mungkin dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun proposisi penelitian ini adalah : Implementasi pengendalian internal dalam kegiatan simpan pinjam dan pembagian SHU di Koperasi Gatra V telah memenuhi komponen pengendalian COSO.

### **3.2.3. Unit Analisis**

Sesuai penggolongan unit analisis dalam sebuah penelitian kualitatif Yin (2013), penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan *single case study* karena hanya menggunakan satu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah koperasi karyawan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V (MOR V) yang bernama Koperasi Karyawan Gatra V.

### **3.2.4. Logika yang Mengaitkan Data dengan Proposisi**

Hubungan logis antara data dengan proposisi penelitian terbentuk ketika proposisi dianalisa dengan menggunakan data-data yang relevan. Pada Tabel 3.1. Logika Hubungan Data dan Proposisi dijelaskan mengenai keterkaitan antara data yang akan dikumpulkan dengan proposisi penelitian.

**Tabel 3.1. Logika Hubungan Data dan Proposisi**

<b>Proposisi</b>	<b>Data yang Relevan</b>	<b>Hubungan Logis</b>
Implementasi pengendalian internal dalam kegiatan simpan pinjam dan pembagian SHU di Koperasi Gatra V telah memenuhi komponen pengendalian COSO	Data yang menunjukkan 1. Desain kegiatan simpan pinjam dan pembagian SHU. 2. Kondisi lingkungan pengendalian saat penelitian 3. Kondisi penilaian risiko yang ada 4. Kondisi aktivitas pengendalian yang dijalankan 5. Kondisi informasi dan komunikasi yang sedang berjalan 6. Kondisi monitoring yang dijalankan 7. Sudut pandang pembuat kebijakan dalam menyusun prioritas perbaikan pengendalian internal. 8. Pendapat pihak independen mengenai sistem pengendalian internal	Dengan mendapatkan data tersebut maka akan terlihat desain aktivitas simpan pinjam dan pembagian SHU dan implementasinya di lapangan. Selain itu juga diperoleh gambaran dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi komponen pengendalian internal, yaitu dari pelaksana, pembuat kebijakan dan pihak independen.

### **3.2.5. Kriteria untuk Mengintepretasikan Temuan**

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi komponen pengendalian yang belum memadai dan mengidentifikasi prioritas perbaikan di Koperasi Gatra V. Untuk tujuan tersebut maka dibuat suatu kriteria sebagai berikut :

1. Pengendalian internal yang dievaluasi adalah yang sudah diterapkan oleh Koperasi Gatra V saat ini.

2. Pengendalian internal diukur dengan menggunakan kriteria memenuhi 17 prinsip pengendalian COSO dengan detail sesuai yang tertera dalam Tabel 2.2 diawal.
3. Data diperoleh dari sumber relevan, bukan merupakan asumsi subjektif.
4. Semaksimal mungkin data diinterpretasikan dengan objektif sesuai dengan kenyataan dan berusaha menghindari adanya kesalahan dan bias.
5. Data diinterpretasikan dengan metode yang benar yaitu sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditetapkan.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder, adapun data yang digunakan antara lain :

1. Dokumentasi, berupa data struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagan proses bisnis, laporan keuangan, notulen rapat, surat dan memo yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan pengendalian internal.
2. *Archival records*, berupa data hasil audit tahun 2014 beserta langkah tindak lanjut yang telah diambil.
3. Hasil wawancara, yaitu informasi langsung dari pihak yang langsung berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti.

### **3.4. Prosedur Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, antara lain :

## 1. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilakukan dengan rangka untuk memperoleh gambaran umum mengenai Koperasi Gatra V. Aktivitas penelitian yang dilakukan pada saat survey pendahuluan adalah observasi dan mengumpulkan data dari internal maupun eksternal Koperasi Gatra V, antara lain : struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagan proses bisnis, laporan keuangan, notulen rapat, surat atau memo dan laporan hasil audit beserta progres tindak lanjut atas rekomendasinya.

## 2. Wawancara terstruktur

Sugiono (2010) mengemukakan, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, wawancara tahap pertama bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi penerapan pengendalian internal Koperasi Gatra V, dilakukan dengan menggunakan 140 pertanyaan mengenai 17 prinsip pengendalian COSO dalam bentuk *check list* yang dikembangkan oleh Ernst & Young pada tahun 2014. Adapun responden pada wawancara ini adalah manajemen koperasi sebagai pelaksana aktivitas pengendalian internal sehari-hari yang terdiri dari : Manajer, sekretaris, bagian administrasi, bagian akuntansi, dan bagian umum. Dalam tahap ini wawancara ini tidak dilakukan

kepada pengurus untuk menghindari adanya bias, karena pengurus merupakan pihak yang menyusun sistem pengendalian internal yang mungkin akan memiliki kecenderungan menjawab positif atau tidak independen. Setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dikumpulkan jawabannya serta dievaluasi dengan analisa statistik deskriptif untuk pembobotan, jawaban negative terbanyak responden akan ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan signifikan, jawaban negatif yang sebanding dengan jawaban positif akan ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan moderat, sedangkan jawaban positif terbanyak ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan minor atau sudah sesuai.

Wawancara tahap kedua dilakukan pada pengurus Koperasi sebagai pihak pembuat kebijakan dengan tujuan untuk memvalidasi hasil sementara yang diperoleh dalam wawancara tahap pertama. Responden dalam wawancara ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Pertanyaan dalam wawancara ini adalah rangkuman hasil wawancara pertama yang masih mengandung respond mayoritas negatif. Hasil wawancara akan dianalisa dengan triangulasi dan analisa prioritas. Hasil wawancara tahap pertama yang diidentifikasi sebagai prioritas dalam wawancara kedua ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan signifikan, sedangkan hasil wawancara tahap pertama yang tidak masuk prioritas dalam wawancara kedua, ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan moderat, dan hasil wawancara kedua yang positif ditandai sebagai area yang memerlukan perbaikan minor atau sudah

sesuai. Hasil akhir wawancara kedua juga akan dibandingkan dengan hasil audit pihak independen.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Ada beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data primer dan sekunder, diantaranya akan dilakukan :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan pada tahap survey pendahuluan, wawancara pertama dan kedua. Data yang diperoleh dari wawancara dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

#### **2. Penyajian Data**

Dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, kertas kerja dan sejenisnya. Penyajian data akan lebih difokuskan untuk evaluasi kondisi yang dinilai bermasalah sesuai tujuan penelitian agar lebih terorganisir dan mudah dipahami.

#### **3. Verifikasi Data**

Verifikasi data adalah kegiatan yang ditujukan untuk menilai kredibilitas data. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi hasil wawancara tahap pertama kepada kelompok responden yang berbeda.

#### 4. Triangulasi

Neuman (2011) menyatakan triangulasi adalah gagasan untuk melihat sesuai dari berbagai sudut pandang untuk meningkatkan akurasi. Untuk menghindari bias pada saat melakukan analisa, penulis akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak dan membandingkan dengan dokumen pendukung (data sekunder) terkait termasuk data hasil audit sekaligus melakukan observasi secara langsung bagaimana sistem beroperasi dalam obyek yang sedang diteliti.

Untuk mempermudah pemahaman, alur penelitian akan disusun dalam suatu kerangka kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan teknis yang akan dilakukan dalam penelitian seperti yang tertera dalam Tabel 3.2.:

**Tabel 3.2 Tahapan Teknis Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu	Hasil
1.	Survey Pendahuluan, dengan mengumpulkan dokumen internal Koperasi dan hasil audit	25-29 April 2016	struktur organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagan proses bisnis, laporan keuangan, notulen rapat, surat atau memo dan laporan hasil audit beserta progres tindak lanjut atas rekomendasinya.

2.	Analisa Data Sekunder dan observasi, dengan memilah data yang penting, dan melakukan perbandingan informasi yang diperoleh dengan praktek yang berjalan, kemudian menarik kesimpulan.	02-06 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran Umum Koperasi Gatra V (Sejarah, tujuan, struktur organisasi, dan kegiatan bisnis)</li> <li>- Alur proses bisnis Koperasi</li> <li>- Opini pengendalian internal pihak independen</li> </ul>
3.	Wawancara I dengan check list 17 prinsip COSO,	06-07 Juni 2016 dan 21 Juni 2016	Hasil Wawancara I (Dokumen Check List yang sudah diisi dan ditandatangani responden)
4.	Analisa Hasil wawancara I dengan statistik deskriptif dan reduksi. Statistik deskriptif untuk pembobotan dengan ketentuan : signifikan : kecenderungan negatif, moderat : positif = negatif minor : kecenderungannya positif. Reduksi dilakukan dengan mengambil data area signifikan dan moderat saja.	8-22 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi Wawancara I</li> <li>- Daftar rekapitulasi defisiensi pengendalian internal</li> </ul>
5.	Wawancara II dengan memverifikasi rekapitulasi defisiensi pengendalian internal hasil wawancara I dan pertanyaan prioritas perbaikan	22-23 Juni 2016 dan 21 Juli 2016	Hasil wawancara II (Dokumen wawancara yang ditandatangani responden)



6.	Triangulasi sumber dengan membandingkan jawaban antar responden, indentifikasi pola dan persamaan untuk kesimpulan. Reduksi, hanya menggunakan data yang terverifikasi untuk kesimpulan. Verifikasi prioritas, dengan membandingkan hasil wawancara II dengan data independen.	25-27 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi Hasil Wawancara II</li> <li>- Data defisiensi yang terverifikasi</li> <li>- Prioritas area perbaikan</li> </ul>
7.	Pembobotan hasil wawancara II dengan ketentuan : Signifikan : defisiensi yang perlu prioritas perbaikan, moderat : defisiensi yang tidak masuk prioritas perbaikan, dan minor : telah terverifikasi tidak mengandung kelemahan.	28 Juli 2016	pemetaan prioritas, area perbaikan dan rekomendasi
8.	Identifikasi Risiko dengan cara, memetakan risiko yang teridentifikasi dalam dokumen audit ke dalam proses bisnis Koperasi.	29 Juli 2016	Identifikasi risiko dalam proses bisnis
9.	Membuat kesimpulan dan saran dari data defisiensi terverifikasi, prioritas dan identifikasi risiko.	30 Juli 2016	Kesimpulan dan saran

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

#### **4.1. Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Gatra V**

Koperasi Gatra V didirikan Tahun 1984 dengan oleh karyawan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya dengan akta pendirian badan hukum yang di sahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur Nomor 5710/BH/II/84 tanggal 30 Oktober 1984 dan berkedudukan di Jalan Veteran 6-8 Kec. Krembangan Surabaya, Jawa Timur. Tujuan didirikannya Koperasi Warga Patra V ini adalah untuk menyejahterakan anggota koperasi melalui usaha simpan pinjam, menyediakan kebutuhan pokok dan melakukan jasa pemasaran. Pada tahu 1997, Koperasi Gatra V melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menti Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dengan akta Nomor 1710/PAD/KWK.13/IX/97 tanggal 26 September 1997. Sejak penyempurnaan tersebut koperasi berubah kedudukan di Jl. Jagir No. 88 Wonokromo, namun tujuan utama tetap memajukan kesejahteraan anggotanya.

Awal mula didirikan, koperasi memiliki anggota sebanyak 150 orang dan sampai Desember 2014 anggota koperasi telah berkembang menjadi 435 orang pekerja. Dalam perjalanannya usaha koperasi berkembang mengikuti perkembangan jumlah anggotanya. Pada akhir kepengurusan periode 2011-2014, usaha koperasi meliputi usaha simpan pinjam, penjualan pelumas, toko, foto copy, jasa konsultasi konstruksi Stasiun Pengusian Bahan bakar Umum (SPBU), serta usaha pengadaan dan jasa lain yang sifatnya jangka pendek atau temporer. Namun

semenjak diberlakukan ketentuan bahwa koperasi hanya diperbolehkan memiliki usaha tunggal pada tahun 2014 dan adanya saran dari audit untuk memangkas usaha-usaha yang tidak memberikan kontribusi, maka usaha Koperasi Gatra V menjadi usaha simpan pinjam saja. Usaha tersebut tetap berlangsung hingga saat ini meskipun ketentuan satu usaha tersebut telah dicabut.

#### **4.2. Tujuan Pendirian Koperasi**

Sesuai dengan AD & ART tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, oleh karena itu aktivitas bisnis utamanya adalah kegiatan simpan pinjam khusus untuk anggota meliputi pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, pinjaman untuk kepemilikan kendaraan, dan keikutsertaan pemodal dalam bentuk simpanan sukarela berjangka.

#### **4.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi koperasi Gatra V meliputi 7 orang pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Pengurus ini dipilih dalam RAT dan mempunyai masa jabatan selama 3 tahun. Dalam menjalankan tugasnya pengurus berhak menunjuk seorang manajer dan beberapa pekerja yang bukan anggota koperasi untuk menjalankan bisnis koperasi sehari-hari, yang terdiri dari Sekretaris, Administrasi, Keuangan, Bagian Umum. Struktur Organisasi pengurus koperasi dapat dilihat dalam Gambar 4.1.

Pada periode kepengurusan tahun 2014-2017 susunan pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Made Adi Putra

Wakil Ketua : M Nafik

Sekretaris : Swasti Riatusita

Bendahara I : Dahniar Agusliani

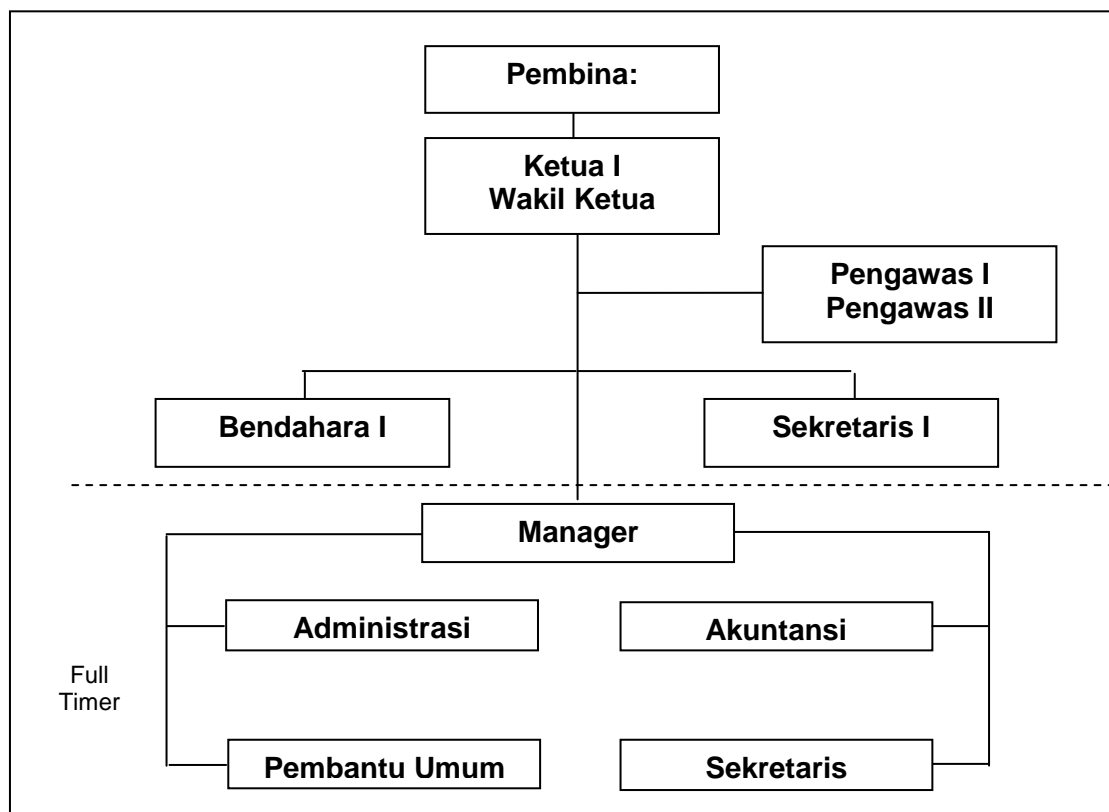
Bendahara II : Ika Yunitasari

Adapun susunan pengawas sebagai berikut :

Pengawas I : Syarief Hamdoen

Pengawas II : Kriswatiningsih

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi**



Sumber : Laporan Hasil Audit Tahun 2014

#### 4.4. Kegiatan Bisnis Koperasi Gatra V

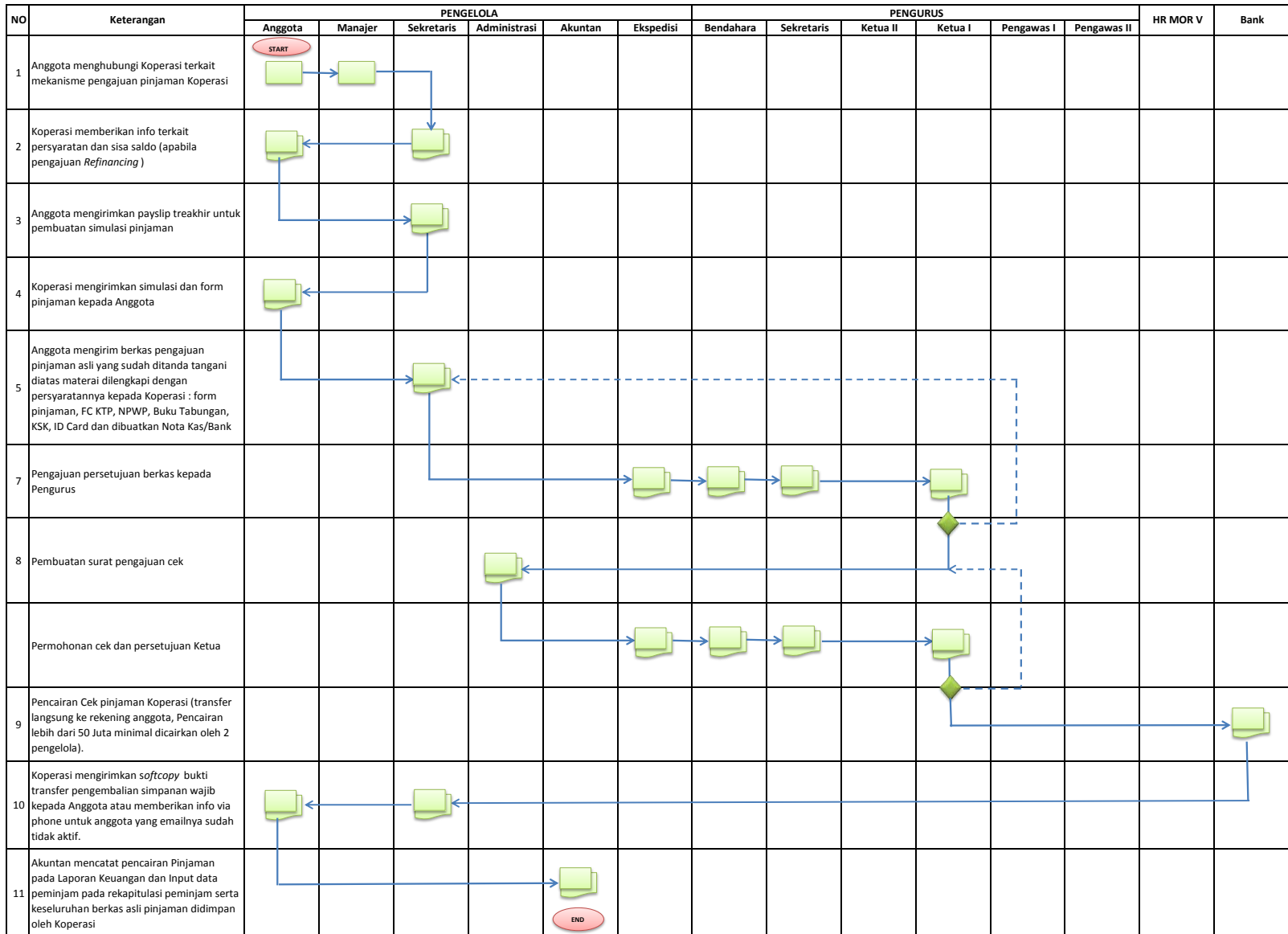
Sesuai dengan tujuannya bisnis utama Koperasi Gatra V adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam rangka memperbesar jangkauan bisnis dan skala ekonomi, Koperasi Gatra V memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Yekapepe dan PT Usaha Patra Lima Jaya, kedua anak perusahaan ini bergerak dalam aktivitas penyediaan jasa tenaga kerja bantu (*outsourcing*), sewa Kendaraan Ringan Penumpang (KRP), sewa mobil tangki dan general supplier.

Pada periode kepengurusan tahun 2014-2017 diputuskan bahwa kegiatan bisnis koperasi hanya bergerak di usaha yang terkait dengan simpan pinjam saja. Adapun kegiatan usaha lainnya diluar usaha simpan pinjam dilakukan oleh anak perusahaan dengan sistem bagi hasil antara koperasi, anak perusahaan dan anggota yang menanamkan modal.

Memperhatikan kegiatan bisnisnya, maka dapat dikatakan bahwa simpan pinjam adalah *core bisnis* koperasi. Dalam proses bisnis simpan pinjam yang terbaru pasca Audit tahun 2014. Koperasi membuat beberapa kontrol utama untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Diantara kontrol utama tersebut adalah pemisahan tugas antara petugas yang melakukan hubungan komunikasi kepada anggota, memproses transaksi dan yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Selain itu juga dibuat sistem bahwa transaksi pembayaran dan penarikan harus melalui reviu minimal 3 pengurus, reviu utama adalah sekretaris, bendahara dan ketua. Kebijakan umum pengendalian juga diterapkan pada saat pembagian SHU, disini proses transaksi diwajibkan untuk reviu ke semua pengurus dan dilarang menggunakan transaksi tunai. Secara rinci

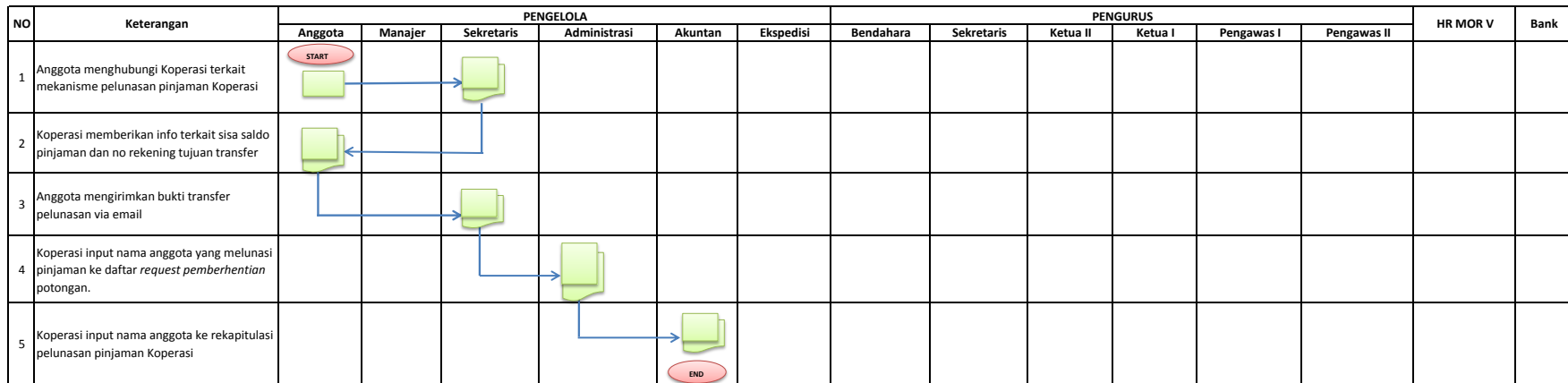
alur bisnis koperasi untuk kegiatan simpan pinjam ada dalam Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 dan alur pembagian SHU ada dalam Gambar 4.5.

Pada Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 alur simpan pinjam dan alur pembagian SHU ada dalam Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa pemisahan tugas dan tanggung jawab dilakukan Koperasi Gatra V dengan memisahkan fungsi layanan, kas dan akuntansi. Fungsi layanan dalam hal ini adalah sekretaris yang bertugas melakukan komunikasi dengan anggota dan menghasilkan dokumen aplikasi pinjaman maupun pelunasan, fungsi kas adalah bagian administrasi yang bertugas melakukan pencairan dan eksekusi keuangan lain serta menghasilkan bukti kas bank, terakhir fungsi akuntansi adalah bagian akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan, membuat jurnal umum, kartu piutang dan laporan keuangan. Secara desain Koperasi Gatra V telah memenuhi syarat untuk terciptanya pengendalian internal.



Sumber : Tata Kerja Organisasi Koperasi tahun 2015

Gambar 4.4. PELUNASAN PINJAMAN KOPERASI



Sumber : Tata Kerja Organisasi Koperasi tahun 2015



## BAB 5

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Profil Responden

Pelaksanaan wawancara untuk memperoleh data primer dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah wawancara pada pekerja Koperasi Gatra V dengan menggunakan desain pertanyaan 17 prinsip COSO yang dikembangkan oleh Ernst & Young tahun 2014. Kelompok kedua adalah wawancara pada pengurus koperasi dengan menggunakan data hasil wawancara pertama yang telah direduksi. Adapun wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dan beberapa wawancara yang lain dilakukan dengan telepon terkait kesibukan responden. Berikut adalah profil responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini :

**Tabel 5.1 Sampel Penelitian Kelompok 1**

No	Nama Responden	P/W	Jabatan	Pendidikan	Lama bekerja	Hari & waktu wawancara
1	Nurul Hijriah	w	Manager	S1	1 tahun	Selasa, 21 Juni 2016 Pukul 09.00-11.30 WIB
2	Ferawaty Mayasari	w	Administrasi	D1	1 tahun	Senin, 6 Juni 2016 Pukul 13.30-15.00 WIB
3	Dewi Ratih Laniawati	w	Accounting	SMK	1 tahun	Selasa, 7 Juni 2016 Pukul 09.00-11.30 WIB
4	Abdillah Muhammad Taufiq	P	Umum	SMA	1 tahun	Senin, 6 Juni 2016 Pukul 09.00-11.30 WIB
5	Kanti Ayu Lestari	W	Sekretaris	SMA	1 tahun	Tidak dilakukan wawancara karena cuti melahirkan

**Tabel 5.2. Sampel Penelitian Kelompok 2**

No	Nama Responden	P/W	Jabatan	Pendidikan	Lama menjabat	Hari & waktu wawancara
1	Made Adi Putra	L	Ketua	S2	2 tahun	Kamis, 21 Juli 2016 Pukul 09.00-11.30 WIB
2	Muhammad Nafiq	L	Wakil Ketua	S2	2 tahun	Rabu, 22 Juni 2016 Pukul 8.30-9.00 WIB
3	Swasti Riatusita	w	Sekretaris	S1	2 tahun	Rabu, 22 Juni 2016 Pukul 11.00-11.30 WIB
4	Ika Yunitasari	W	Bendahara	D3	2 tahun	Rabu, 22 Juni 2016 Pukul 14.00-14.30 WIB
5	Kriswatiningsih	W	Pengawas II	S1	2 tahun	Kamis, 23 Juni 2016 Pukul 12.00-12.30 WIB

Responden yang tertera dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 adalah responden yang dipilih sesuai dengan relevansi penelitian, yaitu orang-orang yang menduduki jabatan yang terkait langsung dengan aktivitas pengendalian internal. Responden nomor 5 dalam sampel Tabel 5.1 tidak dapat dilakukan wawancara karena sedang berhalangan.

## **5.2. Kriteria Data yang Digunakan**

Pada tahap analisa dan pembahasan, beberapa kriteria data digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang dinilai relevan dengan tujuan penelitian. Untuk data sekunder, dokumentasi internal Koperasi Gatra V yang dianggap relevan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Laporan Keuangan Tahun 2014, Laporan Hasil

Audit tahun 2014, Alur kerja simpan pinjam dan SHU, dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit. Adapun data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara terstruktur yang dilakukan pada kedua kelompok sampel tersebut diawal, dengan pemilihan responden yang dinilai memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menggambarkan obyek yang sedang diteliti.

2. Sesuai dengan alur teknis penelitian, penelitian ini mengulas aktivitas pengendalian internal yang telah berjalan dalam proses bisnis Koperasi Gatra V selama satu tahun terakhir. Waktu satu tahun (2015-2016) dihitung dari implementasi pengendalian internal pasca dilaksanakannya *improvement* terhadap sistem pengendalian internal sesuai rekomendasi audit tahun 2014. Adapun periode satu tahun sebelumnya (2014-2015), dianggap sebagai periode rekonstruksi sistem pengendalian internal, sehingga dianggap belum cukup implementasinya untuk dilakukan penelitian.

### **5.3. Hasil Analisis**

Sesuai dengan rancangan penelitian yang telah disusun pada bab sebelumnya, hasil penelitian akan disajikan dengan mengikuti kerangka kerja pelaksanaan, yang pertama adalah *screening* aktivitas pengendalian internal dalam proses bisnis Koperasi Gatra V dengan menggunakan 17 prinsip COSO dengan cara melakukan wawancara kepada kelompok responden pertama, kemudian melakukan verifikasi dengan melakukan wawancara pada kelompok responden kedua, kemudian menyusun hasil verifikasi, menilai prioritas, membandingkan

dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit, terakhir membuat kesimpulan dan memetakannya ke dalam bagan proses bisnis.

### **5.3.1. Wawancara Tahap Pertama**

Evaluasi ini menggunakan rangkaian pertanyaan terstruktur berdasarkan 17 prinsip COSO yang diadopsi dari format yang dikembangkan oleh Ernst&Young tahun 2014. Setiap komponen dan prinsip akan dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan agar mampu memotret kondisi pengendalian internal saat ini dengan lebih baik. Pertanyaan yang digunakan berupa *check list* yang mengungkapkan jawaban positif dan negatif yang berjumlah 140 pertanyaan. Jawaban dari responden baik berupa jawaban positif maupun negatif, jika dinilai tidak sesuai dengan hasil observasi, maka akan dituliskan keterangan lebih lanjut mengenai topik tersebut. Jawaban yang diberikan responden akan validasi dengan triangulasi sumber, sehingga hanya jawaban mayoritas atas pertanyaan yang sama yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Secara rinci daftar pertanyaan dari masing-masing komponen dan prinsip COSO dapat dilihat dalam Lampiran 1 Template Wawancara Tahap Pertama.

Hasil wawancara tahap pertama dapat dilihat dalam Lampiran 2. Hasil Wawancara I dan analisa statistik deskriptif atas hasil wawancara tahap pertama dapat dilihat dalam Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Wawancara I. Hasil rekapitulasi dalam Lampiran 3 tersebut secara ringkas disarikan dalam tabel 5.3. sebagai berikut :

**Tabel 5.3. Ringkasan Respond Pertanyaan Wawancara Tahap Pertama**

Komponen dan Prinsip COSO	Jumlah pertanyaan	Mayoritas respond positif	Respond positif dan negatif sebanding	Mayoritas respond negatif
<b>Lingkungan Pengendalian</b>				
Prinsip 1	12	9	1	2
Prinsip 2	8	7	0	1
Prinsip 3	10	10	0	0
Prinsip 4	11	10	0	1
Prinsip 5	8	7	0	1
<b>Penilaian Risiko</b>				
Prinsip 6	7	7	0	0
Prinsip 7	6	5	0	1
Prinsip 8	7	7	0	0
Prinsip 9	3	2	0	1
<b>Aktivitas Pengendalian</b>				
Prinsip 10	13	12	0	1
Prinsip 11	9	6	0	3
Prinsip 12	4	3	0	1
<b>Informasi dan komunikasi</b>				
Prinsip 13	6	6	0	0
Prinsip 14	11	11	0	0
Prinsip 15	5	4	0	1
<b>Pemantauan</b>				
Prinsip 16	12	10	0	2
Prinsip 17	8	8	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Berdasarkan data dalam tabel 5.3 dapat disimpulkan bahwa dari ke 17 prinsip COSO yang sedang dievaluasi, pengendalian internal yang telah memadai adalah :

1. Prinsip 3 : Membuat struktur, garis pelaporan, otorisasi dan pertanggungjawaban
2. Prinsip 6 : Menetapkan tujuan dengan jelas
3. Prinsip 8 : Menilai potensi risiko fraud

4. Prinsip 13 : Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan
5. Prinsip 14 : Mengkomunikasikan secara internal
6. Prinsip 17 : Mengkomunikasikan secara eksternal

Adapun untuk 11 prinsip pengendalian yang lainnya masih mengandung kelemahan.

### **5.3.2. Analisa Hasil Wawancara Tahap Pertama**

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara tahap pertama mengenai 17 prinsip pengendalian kepada para pekerja koperasi, maka telah didapatkan gambaran umum (*screening*) mengenai kondisi pengendalian internal yang telah berlangsung di dalam Koperasi Gatra V sesuai tabel 5.3. Adapun rincian pengendalian internal Koperasi Gatra V yang masih mengandung defisiensi dapat dilihat dalam tabel 5.4 Rekapitulasi Defisiensi Pengendalian Internal (Hasil wawancara tahap pertama kepada pekerja koperasi).

Berdasarkan Tabel 5.4 Rekapitulasi Defisiensi Pengendalian Internal, dapat dilihat bahwa dari 17 prinsip pengendalian internal (140 pertanyaan) yang diwawancarakan pada tahap pertama telah direduksi menjadi 11 prinsip pengendalian internal (16 pertanyaan) mengenai pengendalian internal yang masih terdapat kelemahan. Kelemahan inilah yang kemudian akan diverifikasi kepada pengurus sebagai penanggungjawab utama sistem pengendalian internal di Koperasi Gatra V.

**Tabel 5.4. Rekapitulasi Defisiensi Pengendalian internal (Hasil wawancara tahap pertama kepada pekerja koperasi)**

	Prinsip		No. Pertanyaan	Aspek yang Mengandung Defisiensi	Penjelasan dari Pekerja Koperasi & hasil observasi
Lingkungan pengendalian	1	Komitmen pada integritas dan nilai-nilai etis.	1.4	Terdapat kode etik yang telah di komunikasikan secara memadai keseluruh anggota	Belum ada tertulis baru himbuan
			1.8	komitmen organisasi akan integritas dan perilaku etis telah dimasukkan dalam pelatihan pekerja baru	Tidak dalam bentuk pelatihan hanya berupa briefing
			1.11	Organisasi memiliki level toleransi terhadap deviasi pelaksanaan kode etik. Level toleransi tersebut telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Deviasi tersebut dievaluasi pada saat yang tepat.	Sepertinya ada tetapi tidak dikomunasikan
	2	Independensi pengurus terhadap manajemen dalam menjalankan tugas	2.4	Pengurus mengikuti training untuk menjaga skill dan keahlian tetap update dan relevan	Belum pernah melihat adanya training pengurus
	4	Organisasi menunjukkan komitmen pada kompetensi	4.10	Terdapat proses formal untuk mengevaluasi kompetensi, mengidentifikasi kesenjangan dan mendokumentasikan rencana remediasi yang spesifik dan terukur untuk mengatasi risiko yang mendasari dan menjadi akar penyebab adanya ketidakmampuan, pelatihan, motivasi dan pemicu perilaku lainnya (yang menghasilkan masalah kompetensi)	Baru identifikasi, rencana pengembangan belum ada
	5	Organisasi membangun dan mengembangkan akuntabilitas	5.5	Pengurus menetapkan target keuangan yang realistis (tidak terlalu agresif)	Tidak ada
Penilaian Risiko	7	Mengidentifikasi dan menilai risiko	7.3	Terdapat identifikasi risiko yang komprehensif mencakup risiko signifikan atas interaksi internal dan eksternal.	Tidak tertulis sehingga tidak komprehensif.
	9	Mengidentifikasi dan menilai perubahan signifikan yang berpengaruh pada sistem pengendalian internal	9.1	Terdapat kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi perubahan eksternal yang berdampak signifikan pada organisasi (misalnya perubahan peraturan dan ekonomi ) Terdapat proses untuk menginformasikan pada pengurus tentang perubahan tersebut.	Tidak ada yang punya tugas seperti itu. Informasi bisa datang dari siapa saja, tapi tidak ada yang diwajibkan

Aktivitas pengendalian	10	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian	10.13	Terdapat proses berkala untuk meninjau sistem dan pengendalian terhadap akses ke database organisasi	Tidak Ada
	11	Menetapkan dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi	11.2	Terdapat sistem yang berperan mengolah transaksi yang signifikan menjadi laporan keuangan yang telah dilengkapi pengendalian umum atas sistem tersebut.	Kita menggunakan sistem manual dengan bantuan komputer, pengendalian melekat ke orang
			11.6	Pengendalian umum atas TI telah diidentifikasi dengan tepat mempertimbangkan infrastruktur teknologi yang digunakan (misalnya , backup aplikasi , database dan sistem operasi)	Belum ada back up
			11.9	Terdapat pengendalian teknologi yang cukup untuk mengatasi risiko penggunaan aplikasi oleh pihak ketiga	IT hanya meliputi alat komunikasi berupa telepon fax dan email, selain itu adalah komputer untuk bekerja. Sejauh ini tidak ada prosedur khusus untuk mengamankan dari pihak lain
12	Mengimplementasikan melalui prosedur dan teknologi.	12.4	Untuk operasional manual apakah organisasi memiliki kebijakan formal dan prosedur yang minimal menentukan pendekatan keamanan sistem (termasuk kerahasiaan data dan informasi)	Tidak ada, yang kita lakukan hanya menyeleksi jika ada permintaan data ataupun informasi, itupun dengan justifikasi masing-masing personel.	
Informasi & komunikasi	15	Mengkomunikasikan secara eksternal	15.5	Organisasi memiliki saluran komunikasi yang terpisah untuk pihak eksternal dalam mengkomunikasikan kejanggalan (whistleblower)	Biasanya ke pengawas atau ke ketua



Monitoring	16	Menetapkan, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan.	16.10	Terdapat penilaian berkala terhadap keamanan lingkungan TI	tidak ada, mungkin karena masih manual
			16.11	Terdapat prosedur untuk memantau ketika kontrol diabaikan dan menentukan pengabaian itu tepat.	Tidak ada, jika ada prosedur yang tidak jalan, biasanya akan dilakukan oleh pekerja lain.

### 5.3.3. Wawancara Tahap Kedua

Merunut proses penelitian yang sudah didesain dalam Bab III, maka langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara tahap kedua kepada para pengurus koperasi untuk memverifikasi defisiensi atas implementasi pengendalian internal di Koperasi Gatra V sesuai table 5.4. Jawaban responden akan ditampung dan divalidasi dengan menggunakan triangulasi, mengingat jawaban responden adalah uraian atau bukan pernyataan positif dan negatif, maka akan dilakukan analisa terhadap pola dari variasi jawaban yang diterima untuk menarik kesimpulan. Adapun hasil verifikasi dapat dilihat dalam kertas kerja di Lampiran 4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Tahap Kedua Dengan Pengurus Koperasi.

Berdasarkan tabel pada Lampiran 4 dapat disarikan kesimpulan hasil wawancara dengan pengurus sebagai berikut :

1. Dari 16 kelemahan yang teridentifikasi pada wawancara tahap pertama, terdapat 3 item yang pada dasarnya telah dilaksanakan dengan cukup memadai, antara lain :
  - 1) Program training untuk pengurus.
  - 2) Proses peninjauan manual terkait pelaporan keuangan, dan *approval*.
  - 3) Saluran wistleblower untuk pihak eksternal.
2. Terdapat 2 item yang dinilai minor terkait sistem operasional dan pelaporan yang masih manual, antara lain :
  - 1) Penggunaan aplikasi oleh pihak ketiga.
  - 2) Penilaian berkala terhadap lingkungan Teknologi Informasi (TI).

Dengan demikian hasil penilain atas pengendalian internal di Koperasi Gatra V yang telah terverifikasi mengidentifikasi 11 kelemahan dalam pengendalian internal yang masih perlu perbaikan yang tertera dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.5. Defisiensi Pengendalian Internal Setelah Verifikasi**

<b>Komponen COSO</b>	<b>No</b>	<b>Defisiensi Pengendalian Internal setelah verifikasi</b>
Lingkungan Pengendalian	1	Belum ada kode etik/pakta integritas/core value yang tertulis yang dapat dijadikan pedoman integritas dan perilaku etis
	2	Belum ada pelatihan atau sosialisasi yang memasukkan materi integritas dan kode etik
	3	Sudah ada mekanisme penentuan level dan deviasi meskipun belum sempurna (baku)
	4	evaluasi kompetensi hanya diawal rekrutmen, evaluasi lanjutan belum berjalan.
	5	belum punya target keuangan yang realistis
Penilaian Risiko	6	hanya memetakan risiko internal, belum mencakup risiko eksternal
	7	belum ada personal atau kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi perubahan eksternal yang berdampak signifikan
Aktivitas pengendalian	8	sistem pelaporan keuangan yang dipakai manual dengan bantuan komputer, dibantu pengendalian melekat pada perorangan
	9	Masih menggunakan sistem manual, dan tidak mengamankan data penting secara periodik.
	10	kebijakan formal dan prosedur pengamanan kerahasiaan data dan informasi belum memadai
Monitoring	11	sudah ada mekanisme untuk menilai apakah kontrol diabaikan atau tidak dan menentukan besaran dampaknya, akan tetapi tidak ada konsekwensi yang diterapkan sebagai tindak lanjut penilaian tersebut.

### 5.3.4. Prioritas Perbaikan Sistem Pengendalian Internal

Pada saat wawancara tahap kedua dengan pengurus koperasi, masing-masing sesi wawancara responden diakhiri dengan pertanyaan “dari seluruh kelemahan pengendalian internal yang terdeteksi, mana menurut saudara yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan?”. Jawaban responden ada dalam Tabel 5.6. sebagai berikut :

**Tabel 5.6. Prioritas Perbaikan Kelemahan Pengendalian Internal**

<b>Pertanyaan prioritas perbaikan</b>		
Dari seluruh kekurangan dalam pengendalian internal yang ada, mana yang menjadi prioritas untuk perbaikan ?		
<b>Jawaban Responden</b>		
Ketua	penekanan pada kode etik, target kinerja, dan sistem penilaian kinerja. Menurut saya yang paling penting target kinerja, itu harus didahulukan.	<b>Kesimpulan 17 :</b> Dari keseluruhan prioritas pertama untuk diperbaiki adalah pengawasan dan prioritas kedua adalah kode etik
Wakil	kode etik dan pengawasan simpan pinjam. Pengawasan maksud saya bukan monitoring, tapi pengawasan yang melekat di system, kalau kita buat otomasi tugas pengawasan kita kan tidak susah-susah seperti sekarang. Kalau memilih yang utama pengawasan.	
Sekretaris	kode etik dan pengawasan. Pengawasan yang menggunakan system seperti SAP. Kalau yang prioritas didahulukan menurut saya pengawasan, sekarang pekerjanya relative baru masih jujur-jujur.	
Bendahara	pengawasan dan monitoring, kode etik masih aman, untuk meminimalisir kerugian, Kode etik juga perlu, lalu pengembangan bisnis. Pengawasan dalam hal ini pakai aplikasi. Kalau saya prioritas pengawasan dan monitoring daripada kode etik, biar memudahkan saya reviu.	
Pengawas	kode etik dan pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah penggunaan system berbasis otomatisasi, saya prioritas pengawasan	

Mengacu pada Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki adalah aspek pengawasan dan prioritas kedua adalah kode

etik. Pengawasan dalam hal ini adalah pengendalian yang ada dalam kelompok aktivitas pengendalian, dimana berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sistem yang digunakan dalam aktivitas simpan pinjam hingga ke pelaporan dan pembagian SHU menggunakan sistem manual dengan bantuan komputer. Koperasi Gatra V perlu mewacanakan membuat sistem aplikasi yang memungkinkan adanya pengawasan yang lebih efektif untuk mengantisipasi kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks dan mengurangi ketergantungan pada faktor manusia.

Sedangkan untuk prioritas kedua, kode etik masuk dalam kelompok lingkungan pengendalian, dimana berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa tidak ada pakta integritas, tata nilai yang menjadi core value, maupun piagam yang memuat kode etik. Sejauh ini praktek bisnis masih masuk dalam koridor etik karena unsur manusia yang ada didalamnya, jika terjadi perubahan personil, tidak ada panduan bahwa personil yang baru akan tetap meneruskan tata nilai yang dikembangkan oleh personil yang ada saat ini. Koperasi Gatra V perlu membuat panduan kode etik tertulis untuk memperkecil kemungkinan pergeseran nilai-nilai etis ke arah yang tidak diharapkan.

### **5.3.5. Verifikasi Prioritas Perbaikan dengan Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Tahun 2014**

Berdasarkan data dalam Matriks Tindak Lanjut Temuan Audit Koperasi Tahun 2014 yang diupdate melalui *Audit Monitoring System* (AMS) per 31 Maret

2016 (Lampiran 6. Matriks Tindak Lanjut Temuan Audit Koperasi Tahun 2014) diketahui bahwa seluruh rekomendasi audit telah selesai dilaksanakan kecuali untuk satu *issue* yaitu belum adanya sistem aplikasi akuntansi pada pembukuan koperasi sehingga ada potensi *fraud*. Untuk permasalahan tersebut audit merekomendasikan kepada Pengurus Koperasi Warga Patra V agar membuat sistem aplikasi akuntansi pada pembukuan koperasi.

Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi audit tersebut sesuai dengan kesimpulan akhir penilaian sistem pengendalian internal di Koperasi Gatra V yang telah dilakukan dengan 17 prinsip COSO, bahwa masih terdapat kelemahan yang signifikan pada komponen aktivitas pengendalian, yaitu Koperasi Gatra V perlu meningkatkan pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan dengan menginstal aplikasi sistem keuangan.

#### **5.3.6. Area Perbaikan yang Dipetakan Dalam Prioritas**

Berdasarkan serangkaian evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat dibuat pemetaan kelemahan pengendalian internal dalam 5 komponen dan 17 prinsip COSO sebagai berikut :

Tabel 5.7. Pemetaan Prioritas, Area Perbaikan &amp; Rekomendasi

Komponen & Prinsip COSO	Prioritas		Area Perbaikan	Rekomendasi		
	Wawancara					
	I	II				
Lingkungan Pengendalian	P1	H	H	Belum ada : - Pedoman kode etik tertulis, - Pelatihan & sosialisasi mengenai integritas dan kode etik, - Level deviasi pelaksanaan kode etik yang baku	membuat kode etik tertulis/pakta integritas/core value dsb. tidak cukup hanya himbauan perlu diadakan awares melalui sosialisasi maupun pelatihan perlu peningkatan dengan membuat ketentuan mengenai kode etik, sanksi/rewardnya serta mengkomunikasikan ke seluruh organisasi.	
		P2	H	L	-	-
		P3	L	L	-	-
	P4	H	M	Belum ada evaluasi kompetensi yang berkesinambungan.	melakukan evaluasi kompetensi lanjutan untuk melihat apakah masih sesuai dengan tuntutan jabatan	
	P5	H	M	Belum mempunyai target keuangan yang realistis	membuat target keuangan yang realistis yang mengakomodir semua sumber pendapatan (operasional, anak usah, kerjasama eksternal)	
Penilaian Risiko	P6	L	L	-	-	
	P7	H	M	Pemetaan risiko belum tertulis dan hanya mengakomodir risiko internal (simpan pinjam)	membuat pemetaan risiko eksternal terutama yang terkait pengembangan bisnis.	
	P8	L	L	-	-	
Aktivitas Pengendalian	P9	H	M	Tidak ada personal atau kelompok yang bertugas mengantisipasi perubahan eksternal yang berdampak signifikan	untuk pengembangan usaha, personil yang menangani masalah ini sangat krusial, oleh karena itu perlu ditunjuk atau dimasukkan dalam uraian tugas.	
	P10	H	L	-	-	
Aktivitas Pengendalian	P11	H	H	Sistem pelaporan keuangan yang dipakai manual dengan bantuan komputer, ketergantungan pada personel besar	Perlu peningkatan pada sistem otomatis untuk efektivitas	
				Tidak mengamankan data penting secara periodik	membuat prosedur pengamanan data penting (seperti : data anggota, data piutang) secara berkala	

	P12	H	M	kebijakan formal dan prosedur pengamanan kerahasiaan data dan informasi belum memadai	perlu adanya briefing/sosialisasi mengenai data apa saja yang penting, siapa yang dapat diberikan data, dan atas persetujuan level apa pemberian data tersebut.
Informasi & komunikasi	P13	L	L	-	-
	P14	L	L	-	-
	P15	H	L	-	-
Pemantauan	P16	H	M	Ada mekanisme menilai apakah kontrol diabaikan dan menentukan besaran dampak, tetapi tidak ada konsekwensi yang diterapkan sebagai tindak lanjut penilaian tersebut.	membuat ketentuan baku mengenai pengabaian kontrol dan konsekwensinya sekaligus reward jika kontrol berjalan dengan baik sesuai tujuan koperasi
	P17	L	L	-	-

Ket : H = High (signifikan), M = Medium (moderat) , L = Low (minor)

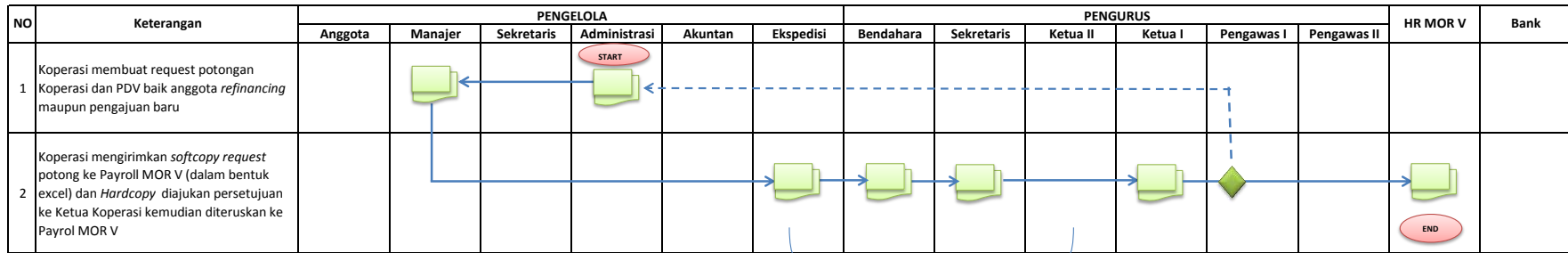
Memperhatikan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa di dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V, perbaikan signifikan diperlukan pada komponen lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, terutama dalam prinsip 1 mengenai komitmen terhadap integritas dan nilai etis dan prinsip 11 mengenai penetapan dan pengembangan pengendalian umum atas teknologi.

Prioritas perbaikan utama ditujukan untuk melakukan migrasi dari sistem operasional koperasi yang manual menuju otomatisasi kemudian pembuatan kode etik secara tertulis sebagai prioritas kedua. Dengan demikian sebagai bahan masukan dalam melakukan otomatisasi, dapat digambarkan evaluasi kelemahan aktivitas pengendalian internal atas proses bisnis simpan pinjam dan pembagian SHU dalam Gambar 5.1, Gambar 5.2, Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.





Gambar 5.2. PENGAJUAN REQUEST POTONGAN



Sumber : Tata Kerja Organisasi Koperasi tahun 2015

terdapat risiko kesalahan perhitungan dan pemotongan baik kelebihan maupun kurang (ref. Temuan Audit 2014)

Proses otomatis memungkinkan perhitungan pemotongan gaji untuk pembayaran piutang dilakukan otomatis by sistem, sehingga mengurangi risiko salah hitung jika dibandingkan dengan manual dan mempermudah proses konfirmasi dengan Payroll MOR V

Berdasarkan bagan proses bisnis koperasi pada Gambar 5.1 hingga Gambar 5.4. dapat diuraikan bahwa dengan menerapkan sistem otomasi pada aktivitas pengendalian di proses bisnis utama, maka Koperasi Gatra V akan mendapatkan manfaat dengan meminimalisir risiko-risiko yang pernah terdeteksi dalam Audit tahun 2014. Risiko yang dapat diminimalisir antara lain :

#### 1. Siklus Simpan Pinjam

##### **Proses pengajuan pinjaman pada Gambar 5.1:**

- 1) Risiko pemberian bunga, dan plafond yang tidak sesuai ketentuan, serta risiko piutang fiktif.
- 2) Risiko *segregation of duty* yang tidak dijalankan.
- 3) Risiko pembuatan cek secara *bulk* untuk beberapa transaksi sehingga sulit ditelusuri.
- 4) Risiko pelaporan yang tidak handal karena data terkumpul dulu baru dibuatkan laporan keuangan (sistem *batch*).

##### **Proses permintaan request potong pada Gambar 5.2 :**

- 1) Risiko kesalahan perhitungan dan pemotongan baik kelebihan maupun kurang.

##### **Proses pelunasan pinjaman pada Gambar 5.3:**

- 1) Risiko sisa saldo pinjaman tidak sesuai dengan saldo pinjaman menurut anggota yang berhutang
- 2) Risiko anggota yang sudah melunasi masih terpotong gajinya.

## 2. Siklus pembagian SHU

### **Proses perhitungan dan pencairan SHU pada Gambar 5.4:**

- 1) Risiko mekanisme perhitungan besaran SHU tidak memiliki dasar yang kuat / tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Risiko *segregation of duty* tidak dijalankan.
- 3) Risiko pelaporan yang tidak handal, data terkumpul baru dibuatkan laporan keuangan (sistem *batch*).
- 4) Risiko pembuatan cek secara *bulk* untuk beberapa transaksi sehingga sulit ditelusuri.

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Gatra V telah membuat banyak kemajuan pasca dilaksanakannya rekomendasi Audit tahun 2014. Namun demikian beberapa prinsip pengendalian COSO yang belum terpenuhi dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah,

Lingkungan pengendalian :

- 1) Belum adanya kode etik/pakta integritas/core value yang tertulis yang dapat dijadikan pedoman integritas dan perilaku etis dalam Koperasi Gatra V.
- 2) Koperasi Gatra V belum pernah membuat pelatihan atau sosialisasi yang memasukkan materi integritas dan kode etik.
- 3) Koperasi Gatra V sudah memiliki mekanisme penentuan level dan deviasi pelaksanaan kode etik, namun belum sempurna (baku).
- 4) Evaluasi kompetensi di Koperasi Gatra V hanya dilakukan diawal rekrutmen, evaluasi lanjutan hingga saat ini belum berjalan.
- 5) Koperasi Gatra V belum memiliki target keuangan yang realistis.

Penilaian Risiko :

- 6) Koperasi Gatra V hanya memetakan risiko internal, belum mencakup risiko eksternal.
- 7) Koperasi Gatra V belum menunjuk personal atau kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi perubahan eksternal yang berdampak signifikan terhadap tujuan organisasi.

Aktivitas pengendalian :

- 8) Sistem pelaporan keuangan yang dipakai di Koperasi Gatra V adalah sistem manual dengan bantuan komputer, dengan sistem ini pengendalian internal melekat pada perorangan.
- 9) Dengan menerapkan sistem manual, Koperasi Gatra V juga tidak mengamankan data penting secara periodik.
- 10) Kebijakan formal dan prosedur pengamanan kerahasiaan data dan informasi dalam Koperasi Gatra V belum memadai.

Monitoring :

- 11) Koperasi Gatra V sudah memiliki mekanisme untuk menilai apakah kontrol diabaikan atau tidak dan menentukan besaran dampaknya, akan tetapi tidak ada konsekwensi yang diterapkan sebagai tindak lanjut penilaian tersebut.

2. Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka komponen pengendalian internal yang telah sesuai dengan COSO adalah informasi dan komunikasi,

namun demikian komponen lain pengendalian masih mengandung kelemahan, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan monitoring.

3. Prioritas perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal dalam Koperasi Gatra V yang pertama adalah pengawasan yang ada dalam komponen aktivitas pengendalian, dan prioritas kedua adalah pembuatan kode etik secara tertulis yang termasuk dalam komponen perbaikan lingkungan pengendalian.
4. Penerapan pengawasan dengan menggunakan aplikasi atau otomasi akan membantu Koperasi Gatra V dalam mereduksi risiko-risiko dalam proses bisnis simpan pinjam dan pembagian SHU sebagai berikut :
  - 1) Risiko pemberian bunga, dan plafond yang tidak sesuai ketentuan, serta risiko piutang fiktif.
  - 2) Risiko *segregation of duty* yang tidak dijalankan.
  - 3) Risiko transaksi yang tidak dapat ditelusuri/diverifikasi.
  - 4) Risiko pelaporan yang tidak handal.
  - 5) Risiko kesalahan perhitungan dan pemotongan gaji.
  - 6) Risiko kehandalan data sisa saldo pinjaman
  - 7) Risiko anggota yang sudah melunasi masih terpotong gajinya.
  - 8) Risiko mekanisme perhitungan SHU tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## 6.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan terutama Koperasi Gatra V dalam menyempurnakan sistem pengendalian internalnya. Saran yang diberikan kepada Koperasi Gatra V adalah :

### **Prioritas Perbaikan :**

1. Koperasi Gatra V seharusnya meningkatkan aktivitas pengendalian internal agar lebih efektif dengan cara mengurangi ketergantungan pengendalian pada personil, melakukan prosedur pengamanan data, dan membuat kebijakan mengenai keamanan dan kerahasiaan data, untuk tujuan perbaikan tersebut, rekomendasi otomasi yang disarankan oleh auditor dapat diterapkan.
2. Membuat kode etik tertulis dalam bentuk pakta integritas, piagam etik atau *core value*, beserta ketentuan mengenai sanksi dan *reward*. Disamping itu dalam mengkomunikasikan kode etik tidak cukup hanya dengan himbauan perlu diadakan *awareness* melalui sosialisasi maupun pelatihan.

### **Perbaikan lain yang disarankan :**

3. Koperasi Gatra V sebaiknya mengadakan evaluasi kompetensi lanjutan secara berkala untuk melihat apakah masih sesuai dengan tuntutan jabatan.
4. Koperasi Gatra V sebaiknya membuat target keuangan yang realistis yang mengakomodir semua sumber pendapatan (operasional, anak perusahaan, kerjasama dengan eksternal) sebagai dasar pengukuran kinerja.
5. Koperasi Gatra V perlu membuat pemetaan risiko eksternal terutama yang terkait pengembangan bisnis.



6. Dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Gatra V, adanya personil yang menangani masalah ini sangat krusial, oleh karena itu perlu penunjukan personil atau dimasukkan dalam uraian tugas jabatan.
7. Baik dengan sistem manual maupun otomatis, Koperasi Gatra V harus membuat prosedur pengamanan data penting secara berkala (seperti : data anggota, data piutang).
8. Koperasi Gatra V perlu mengadakan *briefing*/sosialisasi kepada pekerjanya mengenai data apa saja yang penting, siapa yang dapat diberikan data, dan atas persetujuan level apa pemberian data tersebut.
9. Koperasi Gatra V seharusnya membuat ketentuan baku mengenai pengabaian kontrol dan konsekwensinya sekaligus *reward* jika kontrol berjalan dengan baik sesuai tujuan.

Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperbesar ruang lingkup penelitian dengan memasukkan anggota sebagai sampel.
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melihat perkembangan kemajuan pelaksanaan pengendalian internal dalam organisasi Koperasi Gatra V dari waktu ke waktu.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi komponen lingkungan pengendalian terutama masalah kode etik di Koperasi Gatra V secara lebih mendalam.

4. Penelitian selanjutnya baik untuk penelitian dalam Koperasi Gatra V maupun organisasi lainnya dapat dikembangkan dengan membandingkan tingkat efektivitas pengendalian internal dan kinerja keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz., Abdurrahman, Yahya. 2014. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Al Azhar Press.
- Agoes, Sukrisno., 2012, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Koperasi Gatra V, 1984, Koperasi Gatra V.
- Anoraga, Pandji., 2002, Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder and Mark S. Beasley., 2010, *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*, 9th Edition. New Jersey : Prantice Hall Inc.
- Azhar Susanto, 2013, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung : Lingga Jaya.
- Baumann, Stefanie., 2012. *How To Amend Biased Risk Perception in ERM*, Berlin : Hochschule fur Wirtschaft und Recht.
- Beasley, Mark S., Carcello, Joseph V. Hermanson, Dana R., 1999, *Faudulent Financial Reporting 1987-1997*, COSO.
- Beasley, Mark S., Carcello, Joseph V. Hermanson, Dana R., Neal, Terry L., 2010, *Faudulent Financial Reporting 1998-2007*, COSO.
- Danescu, Tatiana., Dogar, Cristian, 2012, *COSO Principles and European Social Fundfunded Project In Romania*, ScienceDirect.
- Deviana, Rosita, 2014, *Fraud Trianggle dan Faktor yang Mempengaruhi Fraud*, Yogyakarta : UGM.
- Ernst & Young. 2014, *Transitioning to The 2013 COSO Framework For External Financial Reporting Purpose*, [Http://www.ey.com/Publication](http://www.ey.com/Publication)
- Gazzaway, R. Trent., Burton, James P., Gates, Russel G., Newton, Keith O., Ramamoorti, Sridhar., Wood, Richard L., Brietz, R. Jay., 2009, *Guidance On Monitoring Internal Control System*, COSO.

<http://www.aicpa.org/Publications/InternalControl/Pages/InternalControl.aspx>

<http://www.soqlaw.com/s404.htm>

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001, Standar Profesi Akuntan Publik, Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, per 1 Juli 2009, Jakarta : Salemba Empat.

Kobat, Reviyana Win., 2014, Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyalahgunaan Aset Pada PT South Pacific Viscose, Yogyakarta : UGM.

Laporan Hasil Audit No.Prin-02/J00240/2014-S8, 2014, Marketing & Trading Internal Audit JatimBaliNus & Kalimantan.

Laporan Keuangan Koperasi Gatra V Tahun 2014, 2014, Koperasi Gatra V.

Legawa, Panggih., 2015, Peranan Internal Audit dalam Meminimalisasi Fraud, Yogyakarta : UGM.

Maleong, Lexy J. 2014, Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

McNally, J. Stephen CPA., 2013, The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, COSO.

Mukhtar, 2013, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta : GP Press Group.

Mulyadi, 2002, Auditing, 6th Edition, Cetakan Pertama, Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi, 2010, Sistem Akuntansi, Edisi ketiga, Cetakan Kelima, Jakarta : Salemba Empat.

Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi, 2014, Koperasi Gatra V.  
Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Putra, Surya Handika., 2015, Deteksi Indikasi Fraud, Yogyakarta : UGM.  
Sari, Maya Puspita, 2010, Analisa Implementasi ERM pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Yogyakarta : UGM.

- Sarno, Riyanarto.,2009, Audit Sistem & Teknologi Informas,Surabaya : ITS Press.
- Sinaga, Hari J.T., 2014, Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas berdasarkan COSO internal Control Framework 2013 (studi kasus PT Imanuel Agape Tahun 2014), Yogyakarta : UGM.
- Sirait, Gustina A., 2015, Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Pada Siklus Kepegawaian dan Penggajian untuk Menentukan Risiko Fraud (Studi Kasus Wisma MM UGM). Yogyakarta : UGM.
- Soemarsono, S.R., 2009, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharli, Michael, 2008, Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian
- Undang Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- Whittington, O. Ray and Kurt, Pany., 2012, Principles of Auditing, and Other Assurance Services, 18th Edition, New York : Mc. Graw Hill.
- Yin, Robert K., 2013, Studi Kasus Desain & Metode, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## WAWANCARA INTERNAL CONTROL CHECKLIST

Penelitian dengan judul : **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan COSO Studi Kasus : Koperasi Karyawan Warga Patra V (Gatra V)**

Oleh : Dyna Lusi Susanti

NIM : 041224353021

Jurusan : Magister Manajemen

Instansi : Universitas Airlangga Surabaya

Hari :

Pukul :

Profil Responden		
1	Nama	
2	Alamat	
3	No. Telp / HP	
4	Email	
5	Jenis Kelamin	
6	Pekerjaan	
7	Pendidikan terakhir	
8	Lama bekerja/menjadi anggota koperasi	

Responden,

**Nama :.....**

### Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal di seluruh organisasi. Pengurus koperasi dan manajemen koperasi menetapkan kebijakan yang jelas terkait pentingnya pengendalian internal dan perilaku standar yang diharapkan.

Prinsip 1 : Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis.			
No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
1.1	Pengurus dan manajemen koperasi berkomitmen pada integritas dan perilaku etis serta mengkomunikasikannya secara efektif dalam organisasi. Pengurus dan manajemen koperasi telah memberikan teladan dalam hal ini.		
1.2	Kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus dan manajemen koperasi telah dikomunikasikan ke seluruh anggota		
1.3	Kebijakan manajemen koperasi konsisten dengan yang ditetapkan pengurus		
1.4	Terdapat kode etik yang telah di komunikasikan secara memadai keseluruhan anggota		
1.5	Kode etik, telah menghasilkan standar untuk mengarahkan perilaku organisasi, seperti : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjelaskan benar dan salah</li><li>- Merefleksikan hukum yang berlaku, aturan, regulasi, standar dan harapan para stakeholder dari koperasi.</li><li>- Sesuai dengan kebutuhan spesifik proses bisnis sehingga dapat diterapkan secara konsisten.</li></ul>		
1.6	Komitmen organisasi akan integritas dan perilaku etis secara teratur dikomunikasikan kepada pihak eksternal seperti partner bisnis, supplier, outsource service provider, dan instansi terkait lainnya		
1.7	Manajemen koperasi yang direkrut dari luar sudah familiar dengan pentingnya etika dan pengendalian?		
1.8	komitmen organisasi akan integritas dan perilaku etis telah dimasukkan dalam pelatihan pekerja baru		

1.9	organisasi memiliki sebuah proses untuk mengkomunikasikan standar perilaku ke seluruh organisasi dan pihak-pihak eksternal		
1.10	Organisasi memiliki proses untuk mengevaluasi kinerja individu dan tim terkait standar kode etik. Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur kepatuhan secara kontinyu dan periodik</li> <li>- Pertimbangan integritas dan nilai etis dalam mengambil keputusan terkait penilaian kinerja, kompensasi dan promosi.</li> <li>- Investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik oleh pihak yang independen.</li> </ul>		
1.11	Organisasi memiliki level toleransi terhadap deviasi pelaksanaan kode etik. Level toleransi tersebut telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Deviasi tersebut dievaluasi pada saat yang tepat.		
1.12	Organisasi secara periodik menganalisa isu-isu untuk mengidentifikasi trend dan akar masalah untuk mengevaluasi apabila diperlukan modifikasi atas kebijakan, komunikasi, pelatihan dan pengendalian?		

Prinsip 2 : Pengurus koperasi menunjukkan independensi terhadap manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
2.1	Pengangkatan pengurus ( jumlah, latar belakang dan pengalaman) sesuai dengan kebutuhan organisasi.		
2.2	Independensi pengurus telah direviu secara memadai, termasuk adanya afiliasi, hubungan dan transaksi dengan koperasi maupun organisasi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan		
2.3	Keahlian pengurus dievaluasi secara berkala		
2.4	Pengurus mengikuti training untuk menjaga skill dan keahlian tetap update dan relevan		
2.5	Apakah pengawas koperasi memiliki ketentuan tertulis yang menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya		



2.6	Pengurus dan pengawas memperoleh informasi dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam organisasi (meliputi teknologi dan resiko-resiko bisnis dan kontrol yang relevan)		
2.7	Pengurus dan pengawas mengelola hubungan langsung dengan auditor		
2.8	Pengurus dan pengawas mensejajarkan diri dalam praktek pengendalian internal di koperasi sejenis dan memperhatikan peraturan yang berlaku serta perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal dalam organisasi		

Prinsip 3 : Manajemen dengan pengawasan dari pengurus membuat struktur, garis pelaporan, otorisasi dan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
3.1	Skala struktur organisasi, aktivitas operasi dan lokasi organisasi cukup memadai bagi manajemen untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan		
3.2	Reviu dan modifikasi pengurus terhadap struktur organisasi dapat memperbaiki kondisi atau memperbaiki hal-hal prioritas		
3.3	Terdapat garis pelaporan yang jelas dan cukup sehingga membentuk akuntabilitas di seluruh operasinal organisasi. Garis pelaporan tersebut dievaluasi secara berkala sehingga memungkinkan terlaksananya wewenang dan tanggung jawab serta aliran informasi yang baik dalam organisasi.		
3.4	Terdapat deskripsi pekerjaan yang menguraikan tanggung jawab pelaporan keuangan diupdate sesuai kebutuhan		
3.5	Terdapat kebijakan dan prosedur yang memadai untuk otorisasi dan persetujuan transaksi dengan level yang sesuai.		
3.6	Terdapat struktur untuk menetapkan kepemilikan data, termasuk yang berwenang membuat dan / atau mengubah transaksi ?		

3.7	Terdapat pemisahan aktivitas yang memadai (misalnya aktivitas pelaporan dan operasional setoran/penarikan uang) baik secara fisik maupun akses dalam sistem TI?		
3.8	Terdapat klausul tertulis dengan mitra bisnis yang jelas dan ringkas yang menyatakan tujuan organisasi, perilaku dan kinerja yang diharapkan, tingkat kompetensi dan arus informasi dan komunikasi yang diharapkan.		
3.9	Terdapat tanggung jawab penugasan yang jelas, termasuk untuk pihak ketiga ( yang melaksanakan kegiatan atas nama organisasi ) , terkait dengan sejauh mana hak – hak pengambilan keputusan mereka.		
3.10	Terdapat kebijakan yang memadai untuk hal-hal seperti menerima bisnis baru, konflik kepentingan dan praktik pengamanan aset. Yang telah dikomunikasikan secara memadai ke seluruh organisasi .		

Prinsip 4 : Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik , mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
4.1	Terdapat standar dan prosedur untuk merekrut , mengkursuskan , memotivasi , mengevaluasi , mempromosikan , memberi kompensasi, mentransfer dan mengakhiri kerja personil yang berlaku untuk semua bidang fungsional		
4.2	Terdapat prosedur penyaringan untuk pelamar kerja		
4.3	Terdapat kebijakan organisasi dan praktik yang telah berjalan untuk mengartikulasikan keterampilan, kompetensi dan perilaku yang harus dimiliki di semua tingkatan organisasi, termasuk penyedia layanan outsourcing		
4.4	Terdapat deskripsi pekerjaan tertulis, referensi manual atau bentuk komunikasi lain untuk menginformasikan tugas tiap personil		

4.5	Pengurus menunjukkan komitmen untuk menempatkan personil akuntansi dan personil keuangan yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan dan / atau kompleksitas usaha		
4.6	Kebutuhan pelatihan diidentifikasi dan dikirim ke personil yang tepat.		
4.7	Pengurus membentuk kesadaran bahwa para personil akan melaporkan isu-isu atau pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pelaporan keuangan atau pengendalian intern yang signifikan		
4.8	Organisasi memiliki kebijakan dan praktik untuk pelaksanaan dan evaluasi kinerja, termasuk mengambil tindakan remedial untuk setiap masalah yang teridentifikasi		
4.9	Terdapat evaluasi berkala untuk kebutuhan pekerja (Terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman manajemen dan tingkat pengawasan dalam akuntansi, sistem informasi dan pelaporan keuangan)		
4.10	Terdapat proses formal untuk mengevaluasi kompetensi, mengidentifikasi kesenjangan dan mendokumentasikan rencana remediasi yang spesifik dan terukur untuk mengatasi risiko yang mendasari dan menjadi akar penyebab adanya ketidakmampuan, pelatihan, motivasi dan pemicu perilaku lainnya (yang menghasilkan masalah kompetensi)		
4.11	Terdapat kebijakan organisasi seperti rencana suksesi bagi para pekerja dan rencana tugas dan tanggung jawab penting bagi pengendalian internal		

Prinsip 5 : Organisasi memegang tanggung jawab individu sebagai tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
5.1	Terdapat Struktur organisasi dan kebijakan pengurus dalam membangun dan menegakkan akuntabilitas individu untuk melaksanakan tanggung jawab internal kontrol yang telah dikomunikasikan ke semua personil.		

5.2	Terdapat mekanisme yang teratur untuk mendidik dan berkomunikasi dengan manajemen dan anggota mengenai pentingnya internal kontrol, dan peningkatan pemahaman akan kontrol?		
5.3	Manajemen memiliki proses dan kontrol untuk mengevaluasi dan mengarahkan mitra bisnisnya akan tanggung jawab pengendalian internal mereka		
5.4	Organisasi memberikan tindakan, insentif dan manfaat lainnya yang selaras dengan nilai-nilai etika dan kinerja terkait dengan internal kontrol, termasuk langkah-langkah keuangan dan non keuangan		
5.5	Pengurus menetapkan target keuangan yang realistis (tidak terlalu agresif)?		
5.6	Ukuran kinerja direviu secara periodik untuk relevansi dan kecukupannya dalam kaitan dengan potensi risiko dan imbalan		
5.7	Pengurus bertindak untuk menghapus atau mengurangi insentif atau godaan yang mungkin mendorong manajemen & personil untuk terlibat dalam tindakan tidak jujur, ilegal atau tidak etis.		
5.8	Pengurus & manajemen mengevaluasi kinerja tanggung jawab pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap standar perilaku dan tingkat kompetensi		

### **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan entitas dan membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam konteks ini, penilaian risiko melibatkan identifikasi dan analisis risiko dimana laporan keuangan organisasi tidak cukup hanya disajikan sesuai dengan persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku . Sebagai bagian dari proses ini , manajemen menganggap kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal , seperti perubahan dalam standar pelaporan keuangan yang berlaku dan dalam lingkungan internal seperti proses dan prosedur, berpotensi menghambat kemampuannya untuk mencapai tujuannya.

Prinsip 6 : Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan penilaian risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
6.1	Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan keadaan		
6.2	Pengurus menetapkan ambang batas materialitas untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan akun yang signifikan, dan telah mempertimbangkan risiko atas kegiatan organisasi		
6.3	Organisasi menentukan tujuan dengan mengidentifikasi hal-hal berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• akun dalam laporan keuangan yang signifikan</li> <li>• pernyataan yang relevan</li> <li>• dasar transaksi dan kejadian</li> <li>• Proses pendukung akun tersebut dan pengungkapannya</li> </ul>		
6.4	Terdapat kebijakan, prosedur dan proses organisasi yang memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasari terjadinya transaksi? Misalnya, dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevansi - informasi yang berarti bagi pengguna Laporan keuangan</li> <li>• konsisten dalam representasi - informasi yang lengkap, netral dan bebas dari kesalahan</li> <li>• Komparatif - informasi dapat dibandingkan dengan entitas lainnya yang serupa</li> <li>• Verifikatif - informasi yang dapat dibuktikan</li> <li>• Ketepatan waktu - informasi yang tersedia pada waktu yang tepat sehingga berguna untuk pengguna laporan keuangan</li> <li>• Understandability - informasi yang disajikan jelas dan ringkas</li> </ul>		
6.5	Organisasi mempertimbangkan faktor-faktor di poin 6.4 saat menetapkan kebijakan akuntansi di mana langkah alternatif berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan mungkin ada.		
6.6	Organisasi secara berkala meninjau dan memperbarui pemahaman sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku		

6.7	Organisasi memiliki proses untuk mengevaluasi berbagai kegiatan untuk menilai apakah semua kegiatan yang material telah tercermin dalam laporan keuangan		
-----	--	--	--

Prinsip 7: Organisasi mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
7.1	Organisasi mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan laporan keuangan		
7.2	Proses identifikasi risiko laporan keuangan mencakup pertimbangan faktor risiko internal dan eksternal untuk setiap akun laporan keuangan yang signifikan		
7.3	Terdapat identifikasi risiko yang komprehensif mencakup risiko signifikan atas interaksi internal dan eksternal.		
7.4	Organisasi melibatkan manajemen dengan keahlian yang tepat untuk mengidentifikasi dan menilai risiko.		
7.5	Proses penilaian risiko mempertimbangkan kemungkinan kejadian dan besarnya dampak risiko tersebut		
7.6	Penilaian risiko ditinjau kembali pada interval yang tepat		

Prinsip 8 : Organisasi menyadari adanya potensi fraud dalam menilai risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
8.1	Organisasi melakukan penilaian risiko terkait kecurangan pelaporan keuangan, pelanggaran oleh manajemen, potensi kerugian aset dan korupsi.		
8.2	Proses penilaian risiko termasuk evaluasi dorongan, tekanan, peluang, sikap dan rasionalisasi untuk melakukan fraud		
8.3	Penilaian risiko fraud mempertimbangkan peluang untuk akuisisi tidak sah, penggunaan atau penjualan aset, mengubah catatan pelaporan atau melakukan tindakan yang tidak pantas lain		

8.4	Penilaian risiko fraud mempertimbangkan peluang pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah yang disengaja yang bisa berdampak langsung atau tidak langsung dalam laporan keuangan		
8.5	Penilaian risiko fraud mempertimbangkan berbagai cara fraud pada laporan keuangan yang bisa terjadi.		
8.6	Penilaian risiko fraud mempertimbangkan bagaimana Pengurus dan manajemen mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak pantas		
8.7	Organisasi telah menetapkan prosedur rekonsiliasi berkala pada aset fisik dengan catatan akuntansi.		

Prinsip 9 : Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
9.1	Terdapat kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi perubahan eksternal yang berdampak signifikan pada organisasi (misalnya perubahan peraturan dan ekonomi ) Terdapat proses untuk menginformasikan pada pengurus tentang perubahan tersebut.		
9.2	Organisasi mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, pertumbuhan yang cepat, dan teknologi baru pada sistem pengendalian internal.		
9.3	Organisasi memiliki proses untuk mempertimbangkan perubahan pengurus dan manajemen beserta masing-masing sikap dan filosofinya dalam Sistem pengendalian internal		

### Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diatur oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan organisasi untuk mengurangi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan telah dilaksanakan . kegiatan pengendalian dilakukan di semua tingkat dan di berbagai tahap dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan.

Prinsip 10 : Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi untuk memitigasi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima .			
No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
10.1	Organisasi melakukan proses untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>• menyusun risiko laporan keuangan yang teridentifikasi dengan respon yang spesifik.</li><li>• mempertimbangkan semua proses bisnis yang relevan , teknologi informasi dan lokasi di mana kegiatan pengendalian diperlukan.</li><li>• mempertimbangkan aktivitas pengendalian untuk menyusun integritas informasi yang dikirim dan diterima dari pihak eksternal.</li><li>• mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang dilakukan oleh mitra bisnis.</li></ul>		
10.2	Terdapat personil yang tepat dalam proses perancangan dan penerapan pengendalian untuk menangani risiko yang teridentifikasi ( misalnya, bagian keuangan & auditor internal )		
10.3	Pengendalian yang diterapkan oleh organisasi termasuk otorisasi, persetujuan, perbandingan jumlah fisik, rekonsiliasi dan pengawasan.		
10.4	Pengendalian yang diterapkan oleh organisasi sesuai dengan lingkungan, kompleksitas, sifat, ruang lingkup dan karakteristik proses bisnisnya.		
10.5	Pengendalian mencakup berbagai aspek, termasuk manual dan otomatis, preventif dan detektif		
10.6	Pengendalian mampu mengidentifikasi kelengkapan, akurasi dan validitas transaksi yang diproses		
10.7	Pengendalian mampu mengidentifikasi kontrol atas kelengkapan, akurasi dan validitas master data yang digunakan dalam pemrosesan transaksi (Mis : master data anggota) dan pengoperasian kontrol lain (mis : kontrol rekonsiliasi jumlah pinjaman)		



10.8	Organisasi mempertimbangkan efektivitas pengendalian ketika mengevaluasi sejauh mana risiko yang diidentifikasi dapat diatasi. Misalnya, telah mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat kesalahan yang teridentifikasi</li> <li>• Tindak lanjut yang memadai dalam memproses perbedaan atau kesalahan yang teridentifikasi.</li> <li>• Bukti untuk memastikan pengendalian telah beroperasi dengan baik.</li> </ul>		
10.9	Pengendalian ada di berbagai tingkatan dalam organisasi dari tingkat transaksi hingga tingkat entitas tertinggi.		
10.10	Terdapat pemisahan tugas yang tepat (misalnya, pemisahan eksekusi, pencatatan & pelaporan, serta persetujuan/otorisasi) yang tertuang dalam bagan organisasi, diagram alur proses atau bentuk lain untuk memastikan pemisahan yang tepat dari tugas yang ada.		
10.11	Terdapat persetujuan yang sesuai dari pengurus sebelum eksekusi transaksi.		
10.12	Pihak yang memegang database dilarang memiliki tugas dan tanggung jawab di bagian eksekusi/pengguna.		
10.13	Terdapat proses berkala untuk meninjau sistem dan pengendalian terhadap akses ke database organisasi		

Prinsip 11 : Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
11.1	Terdapat proses untuk memilih, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara teknologi dalam organisasi yang telah sesuai dengan kebutuhan.		
11.2	Terdapat sistem yang berperan mengolah transaksi yang signifikan menjadi laporan keuangan yang telah dilengkapi pengendalian umum atas sistem tersebut.		
11.3	Terdapat pengendalian atas akuisisi Program, pelaksanaan dan pemeliharaannya.		
11.4	Terdapat kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh dan menerapkan sistem operasi, database dan aplikasi perangkat lunak.		

11.5	Organisasi memiliki kontrol atas akses ke sistem TI (Database)		
11.6	Pengendalian umum atas TI telah diidentifikasi dengan tepat mempertimbangkan infrastruktur teknologi yang digunakan (misalnya , backup aplikasi , database dan sistem operasi)		
11.7	Terdapat tanggung jawab yang jelas untuk memprakarsai proses pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi internal ( misalnya, faktur ) dan pemberian informasi kepada pihak ketiga ( Misalnya, data keuntungan/fee koperasi)		
11.8	Pengendalian umum atas IT diidentifikasi dengan tepat untuk mengatasi risiko yang timbul karena penggantian atau revisi sistem.		
11.9	Terdapat pengendalian teknologi yang cukup untuk mengatasi risiko penggunaan aplikasi oleh pihak ketiga		

Prinsip 12 : Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menempatkan kebijakan dalam tindakan .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
12.1	Organisasi mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur untuk semua akun dan pengungkapan laporan keuangan yang signifikan		
12.2	Apakah kebijakan dan prosedur organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktik akuntansi dan penutupan yang diikuti secara konsisten di tanggal interim (misalnya, kuartalan, bulanan) sepanjang tahun</li> <li>• Terdapat keterlibatan yang tepat oleh manajemen dalam meninjau estimasi akuntansi yang signifikan dan dukungan untuk transaksi tidak biasa yang signifikan dan jurnal non-standar</li> <li>• dokumentasi transaksi tepat waktu dan cukup</li> <li>• Manajemen mereviu indikator kinerja utama (misalnya, anggaran, profit, tujuan keuangan, tujuan operasi) secara teratur (misalnya, bulanan, kuartalan) dan mengidentifikasi</li> </ul>		

	<p>varians yang signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen menyelidiki varians yang signifikan dan melakukan perbaikan yang tepat</li> <li>• Variasi dalam kinerja yang direncanakan dikomunikasikan dan dibahas dengan pengurus setidaknya triwulan</li> <li>• Manajemen menetapkan prosedur untuk mencegah akses ke, atau perusakan, dokumen, catatan (termasuk program dan file data), dan aset komputer yang tidak sah</li> </ul>		
12.3	Organisasi meninjau kebijakan dan prosedur secara berkala untuk menentukan apakah mereka tetap sesuai untuk kegiatan organisasi dan memperbarui ketika dibutuhkan		
12.4	<p>Apakah organisasi memiliki kebijakan formal dan prosedur yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menentukan pendekatan untuk akuisisi sistem dan mengelola perubahan</li> <li>• Mendapatkan dan menerapkan bagian dari sistem operasi , database dan aplikasi perangkat lunak</li> <li>• Menentukan pendekatan keamanan sistem ( termasuk kerahasiaan Data dan informasi )</li> </ul>		

### **Informasi dan Komunikasi**

Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Komunikasi adalah kegiatan terus-menerus dan proses berulang untuk menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan dan melakukan pengendalian internal, dan untuk menilai efektivitas.

Prinsip 13 : Organisasi memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Y/N</b>	<b>Keterangan</b>
13.1	Organisasi menetapkan kebutuhan informasi untuk mendukung kegiatan pengendalian internal yang efektif pada tingkat yang relevan dan spesifik.		
13.2	Organisasi mempertimbangkan sumber internal dan eksternal saat mengidentifikasi data yang relevan digunakan dalam kegiatan pengendalian internal		
13.3	Manajemen mengevaluasi kembali informasi yang dibutuhkan secara berkala		

13.4	Sistem informasi organisasi menghasilkan informasi yang cukup berkualitas untuk mendukung kegiatan pengendalian yang efektif. Misalnya, manajemen mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian yang berhubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan akurasi data</li> <li>• Perolehan data pada frekuensi yang diperlukan</li> <li>• Memberikan informasi bila diperlukan</li> <li>• Perlindungan data sensitif</li> <li>• Retensi data untuk keperluan bisnis yang relevan, audit dan mematuhi peraturan</li> </ul>		
13.5	Organisasi secara berkala meninjau kualitas informasi untuk menilai kehandalan dan ketepatan waktu		
13.6	Untuk informasi yang diperoleh dari sumber eksternal, organisasi memiliki kontrol untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber-sumber eksternal sesuai</li> <li>• Informasi didukung oleh bukti-bukti valid</li> <li>• Informasi cukup berkualitas untuk mendukung efektifitas pengoperasian kontrol</li> </ul>		

Prinsip 14 : Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal .

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
14.1	Terdapat pelatihan / orientasi bagi karyawan baru mengenai sifat, lingkup tugas dan tanggung jawab mereka.		
14.2	Terdapat kebijakan dan prosedur organisasi yang memfasilitasi komunikasi internal yang efektif termasuk otoritas kontrol dan tanggung jawab individu serta standar perilaku dalam organisasi		
14.3	Terdapat deskripsi pekerjaan dan referensi manual tertulis yang menggambarkan tugas personil, termasuk tanggung jawab pengendalian internal mereka.		
14.4	Pengurus mengkomunikasi tujuan laporan keuangan dengan jelas sehingga semua pihak memahami peran masing-masing dalam organisasi.		

14.5	Organisasi menyampaikan pada seluruh anggota peran mereka dalam memastikan tanggung jawab pengendalian internal telah ditangani secara serius		
14.6	Terdapat proses untuk menyebarkan informasi penting dengan cepat di seluruh organisasi bila diperlukan		
14.7	komunikasi antara pengurus dan manajemen memfasilitasi pengawasan terhadap pengendalian internal dalam organisasi, termasuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal-hal penting untuk penilaian risiko</li> <li>• Hasil program monitoring</li> </ul>		
14.8	Pengurus memiliki akses langsung kepada anggota tanpa campur tangan dari manajemen		
14.9	Audit memiliki jalur komunikasi langsung dengan pengawas		
14.10	Terdapat proses untuk mengkomunikasikan/melaporkan kejanggalan (wistle blower sistem), tindak lanjut atas kejanggalan tersebut.		
14.11	Terdapat kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dikomunikasikan kepada personil di lokasi di luar Jatim Balinus mengenai metode komunikasi yang sesuai		

Prinsip 15: Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
15.1	Terdapat proses untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pihak eksternal (mitra bisnis, instansi pemerintah, analis keuangan dan pihak eksternal lainnya)		
15.2	Terdapat proses persetujuan pengurus untuk komunikasi eksternal resmi sebelum dirilis.		
15.3	Terdapat proses untuk menelusuri komunikasi dari pihak eksternal yang digunakan bersama secara internal		

15.4	Informasi dari pihak eksternal tentang kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pengendalian internal dievaluasi oleh manajemen dan dikomunikasikan kepada pengurus.		
15.5	Organisasi memiliki saluran komunikasi yang terpisah untuk pihak eksternal dalam mengkomunikasikan kejanggalaan (whistleblower)		

### **Pemantauan**

Pemantauan adalah kegiatan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Setiap ada temuan dan kekurangan akan dievaluasi dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pengurus.

Prinsip 16 : Organisasi memilih , mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan / atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian rnal inte hadir dan berfungsi .

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Y/N</b>	<b>Keterangan</b>
16.1	Terdapat proses untuk menilai kontrol dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana dimaksud.		
16.2	Pemantauan termasuk evaluasi terhadap bisnis / proses laporan keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkala.		
16.3	Program monitoring, termasuk perpaduan pemantauan berkelanjutan dan berkala yang mempertimbangkan hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkup dan sifat operasi organisasi</li> <li>• Tingkat risiko</li> <li>• Frekuensi dan besarnya perubahan dalam operaional organisasi</li> </ul>		
16.4	Kegiatan monitoring menghasilkan pemahaman desain sistem pengendalian internal saat ini.		
16.5	Hasil kegiatan monitoring dipertimbangkan untuk menentukan dasar kegiatan monitoring di masa depan.		
16.6	Kedudukan, pelatihan dan keterampilan khusus untuk orang yang melaksanakan pemantauan telah sesuai.		

16.7	Audit digunakan sebagai bagian dari Program pemantauan. Dengan syarat : independen, memiliki akses langsung ke pengurus atau pengawas, memiliki ruang lingkup kegiatan audit tepat sesuai kebutuhan organisasi.		
16.8	Terdapat fungsi quasi-audit lainnya (misalnya, dinas koperassi atau dirjen pajak) yang melapor ke manajemen dan mempengaruhi lingkungan kontrol secara keseluruhan.		
16.9	Kegiatan monitoring meliputi pengamatan, permintaan dan pemeriksaan bukti.		
16.10	Terdapat penilaian berkala terhadap keamanan lingkungan TI		
16.11	Terdapat prosedur untuk memantau ketika kontrol diabaikan dan menentukan pengabaian itu tepat.		
16.12	Kegiatan monitoring mempertimbangkan kontribusi mitra bisnis.		

Prinsip 17: Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen dan Pengurus.

No	Pernyataan	Y/N	Keterangan
17.1	Terdapat proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi hal-hal yang diidentifikasi oleh kegiatan monitoring yang mempertimbangkan akar penyebabnya.		
17.2	Organisasi menerima temuan dan rekomendasi dari pihak eksternal (Dinas Koperasi, dirjen pajak dan eksternal auditor) dan memiliki proses untuk mengevaluasi temuan tersebut.		
17.3	Kelemahan pengendalian internal dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, yaitu manajemen dan pengurus.		
17.4	Hasil audit operasional dilaporkan kepada manajemen pengurus dan anggota		

17.5	Terdapat kebijakan dan prosedur untuk memastikan kelemahan pengendalian dikomunikasikan kepada pihak eksternal sesuai kebutuhan.		
17.6	Manajemen telah mengambil tindakan yang memadai dan tepat waktu untuk memperbaiki kelemahan yang dilaporkan oleh auditor dan oleh pengawas internal lainnya.		
17.7	Manajemen merespon secara tepat waktu dan tepat setiap temuan dan rekomendasi auditor independen mengenai pengendalian intern, kebijakan dan prosedur dalam organisasi.		
17.8	Terdapat proses untuk menelusuri kekurangan pengendalian yang tidak dapat diselesaikan dan protokol untuk mengeskalasi ke tingkat yang lebih tinggi (pengurus).		

SELESAI



**Lampiran 5. Matriks Tindak Lanjut Temuan Audit Koperasi Tahun 2014**

No.	Issue	Rekomendasi	Status Per 31 Maret 2016
1	Adanya Kebijakan Pemberian Gaji dan SHU Kepada Pengelola Koperasi Yang Tidak Diatur Dalam AD/ART.	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar mengevaluasi kebijakan pemberian gaji dan SHU kepada pengelola Koperasi.	Selesai, sejak bulan April 2015, pemberian gaji dan SHU sudah mengacu pada AD/ART.
2	Belum Maksimalnya Usaha Penagihan Piutang Macet	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar melakukan penagihan kembali secara maksimal kepada kreditur.	Selesai. Piutang macet yang dapat ditelusuri dibuatkan berita acara pernyataan piutang dari debitur dan ditagihkan. Piutang macet yang tidak dapat ditelusuri telah dihapuskan.
3	Terjadi Overstated Dalam Penyajian Nilai Piutang Usaha Koperasi Karyawan/wati Warga Patra V.	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar mengevaluasi penyajian nilai piutang usaha dengan tidak memasukkan bunga ke dalam piutang.	Selesai. Penyajian piutang usaha per April 2015 telah mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku. Yaitu hanya membukukan pendapatan bunga yang telah diterima.
4	Penilaian Kinerja Pengurus Koperasi Tidak Dilakukan Sesuai Anggaran Dasar	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar: 1. Membuat sistem penilaian kinerja pengurus Koperasi. 2. Mengevaluasi besaran SHU untuk pengurus.	Selesai. Penilaian yang baru dilakukan dengan cara rapat bersama yang hasilnya dikonversikan dalam SHU. Kontribusi ditentukan berdasarkan keaktifan dalam menghadiri rapat, memecahkan masalah maupun terlibat dalam operasional.
5	Terdapat Ketidakeragaman Pengenaan Bunga Pinjaman Atas Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Non Anggota Koperasi	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar membuat ketentuan terkait pemberian bunga pinjaman kepada Non Anggota koperasi.	Selesai, sejak bulan April 2015, sudah distandarkan besaran bunga dan cara perhitungannya.

6	Terdapat Penyaluran Kredit Kepada 12 (Dua Belas) Anggota Koperasi Tanpa Otorisasi Bendahara Koperasi.	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar: 1. Membuat SOP tentang pemberian pinjaman. 2. Menginstruksikan kepada pengelola Koperasi untuk menyalurkan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Selesai, Mulai April 2014 penyaluran Belum Selesai. Telah dibuat SOP baru pemberian pinjaman sebagai pedoman. Dalam SOP tersebut diwajibkan revidi administrasi oleh sekretaris dan revidi pinjaman oleh bendahara dan otorisasi ketua untuk pencairan pinjaman. Dalam SOP juga disebutkan pinjaman hanya akan dilakukan melalui transfer bank, tidak diperkenankan lagi pemberian pinjaman ataupun pelunasan dengan menggunakan uang fisik. SOP tersebut sudah dilaksanakan, namun belum disahkan
7	Terdapat Catatan Piutang Namun Tidak Ditemukan Adanya Surat Kuasa & Pernyataan Dari Peminjam Di Koperasi Gatra V.	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap piutang yang tidak ada SKP.	Selesai. Telah dilakukan konfirmasi dan hasilnya menunjukkan sebagian besar adalah piutang fiktif. Sehingga dihapuskan. Adapun piutang yang diakui oleh anggota, dihitung sebagai pengurang SHU nya.
8	Terdapat Beberapa Peminjam Yang Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar mengenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran.	Selesai. Dengan SOP yang telah diterapkan, saat ini pemberian dan pelunasan pinjaman melalui transfer bank dan pemotongan gaji. Tidak ada lagi sistem manual. Sehingga meminimalisir risiko keterlambatan. Adapun denda hanya ada pada piutang lama yang sebagian besar piutang non anggota yang tidak lengkap dokumentasinya. Terhadap piutang ini, dilakukan konfirmasi dan berita acara hasilnya, kemudian dilakukan reskeduling pembayaran.
9	Terdapat Peminjam Yang Sudah Pensiun Tetapi Masih Mempunyai Saldo Piutang	Pengurus Koperasi Warga Patra V menginstruksikan kepada pengelola koperasi untuk memperhitungkan masa kerja dalam pemberian pinjaman.	Selesai. Koperasi melakukan kerjasama dengan HR MOR V untuk memperhitungkan saldo hutang anggota ke dalam manfaat pensiunnya. Bagi anggota yang telah pensiun lama, saldo hutang diperhitungkan dalam perolehan SHU dan simpanan wajibnya.

10	Belum Adanya Sistem Aplikasi Akuntansi Pada Pembukuan Koperasi Sehingga Ada Potensi Fraud	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar membuat sistem aplikasi akuntansi pada pembukuan koperasi.	Belum Selesai. Dengan banyaknya dokumentasi yang hilang, saat ini proses perbaikan laporan keuangan baru tahap penyusunan kembali laporan keuangan per 1 Januari 2015. Sistem pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual dengan program excel.
11	Adanya Pemberian Pinjaman Kepada Non Anggota Koperasi	Pengurus Koperasi Warga Patra V menginstruksikan kepada pengelola untuk menyalurkan pinjaman sesuai AD/ART.	Selesai. Per April 2015 sudah tidak diperkenankan lagi.
12	Tidak Adanya Standar Baku Dalam Metode Pembayaran Cicilan Di Koperasi Warga Patra V	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar membuat standar baku dalam pembayaran cicilan piutang.	Selesai. Berdasarkan kesepakatan baru mekanisme pembayaran cicilan wajib melalui transfer bank. Sedapat mungkin menghindari transaksi cash
13	Belum Dilakukannya Penghapusan Atas Piutang Penjualan Pelumas Yang Macet Sejak Tahun 2005	Pengurus Koperasi Warga Patra V agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan physical check atas stok pelumas yang ada.</li> <li>2. Menginstruksikan kepada pengelola untuk menghapuskan piutang penjualan pelumas yang macet.</li> </ol>	Selesai. Telah dilakukan cek fisik terhadap stock pelumas dan diperoleh hasil bahwa secara fisik aset tersebut tidak diketahui keberadaannya, sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan penghapusan.

Sumber : Laporan Hasil Audit Koperasi Gatra V Desember 2014 dan Audit Monitoring System (AMS) per 31 Maret 2016.